



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH

RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI

- Tahun Sidang : **2019 – 2020**
- Masa Persidangan : **I**
- Jenis Rapat : **Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan
Direktur Utama Perum Bulog**
- Hari, Tanggal : **Kamis, 21 November 2019**
- Pukul : **10.00 s.d Selesai WIB**
- Sifat Rapat : **Terbuka**
- Ketua Rapat : **SUDIN, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/
F-PDIP)**
- Sekretaris Rapat : **Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Set. Komisi IV
DPR RI)**
- Tempat : **Ruang Rapat Komisi V DPR RI (KK. IV)
Gedung Nusantara
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270**
- Acara : **1. Evaluasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I
Tahun 2019;
2. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Per-
Oktober Tahun 2019;
3. Rencana Kerja Program Dan Kegiatan
Tahun 2020; dan
4. Isu-Isu Aktual**
- Anggota yang Hadir : **37 Anggota dari 52 Anggota
FRAKSI PDI PERJUANGAN
1. SUDIN, S.E.
2. SUNARNA, S.E., M.Hum.
3. Drs. I MADE URIP, M.Si.**

4. Ir. EFFENDI SIANIPAR
5. ONO SURONO, S.T.
6. Ir. MINDO SIANIPAR
7. YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.
8. Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.
9. KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.
10. RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI GOLKAR

1. H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.H.
2. FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.
3. Ir. ICHSAN FIRDAUS
4. BUDHY SETIAWAN
5. Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.

FRAKSI PARTAI GERINDRA

1. Ir. KRT H. DARORI WONODIPURO, MM
2. Ir. ENDRO HERMONO, MBA
3. Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.

FRAKSI PARTAI NASDEM

1. Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.
2. Drs. FADHOLI
3. Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.
4. YESSY MELANIA, S.E.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1. DANIEL JOHAN, S.E.
2. H. MUHTAROM, S.Sos.
3. LULUK NURHAMIDAH, M.Si.
4. EDWARD TANNUR, S.H.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

1. Drs. GUNTUR SASONO, M.Si.
2. Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.
3. MUSLIM, S.HI., M.M.
4. Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

1. Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.
2. Dr. HERMANTO, S.E., M.M.
3. drh. SLAMET
4. Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

1. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.
2. HAERUDIN, S.Ag., M.H.
3. FACHRY PAHLEVI KANGGOASA, S.E.

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN**

EMA UMIYYATUL CHUSNAH.

- Anggota Yang Izin : 1. H. DEDI MULYADI, S.H.
2. G. BUDISATRIO DJIWANDONO
3. YADI SRIMULYADI
4. VITA ERVINA, S.E.
5. A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA,
S.H., M.H.
6. ALIEN MUS
7. Ir. SUMAIL ABDULLAH
8. Ir. H. T. A. KHALID, M.M.
9. H. SULAEMAN L. HAMZAH
10. FARIDA HIDAYATI, S.H., M.Kn.
11. BAMBANG PURWANTO, SST., M.H.
12. Dr. HERMANTO, S.E., M.M.
13. H. JOHAN ROSIHAN, S.T.
14. SLAMET ARIYADI, S.Psi.
15. K. H. ASEP AHMAD MAOSHUL
AFFANDY, S.Sy.

Undangan : Direktur Utama Perum Bulog (BUDI
WASESO) beserta jajaran.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Salam sejahtera bagi kita semuanya.

**Yang terhormat Pimpinan dan anggota Komisi IV Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia,
Yang terhormat Direktur Utama Perum Bulog beserta jajarannya,
Hadirin yang saya hormati.**

Mengawali rapat hari ini, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala* Tuhan Yang Maha Esa. Karena bekat dan hidayahnya kita dapat mengadakan Rapat Dengar Pendapat ini dalam keadaan sehat walafiat.

Sesuai jadwal-jadwal acara rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa persidangan I tahun sidang 2019-2020 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Bamus tanggal 18 Oktober 2019 dan Putusan Rapat Internal Komisi IV tanggal 31 Oktober 2019. Pada hari ini, Kamis tanggal 21 November 2019 Komisi IV menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perum Bulog dalam rangka membahas *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2019 dan rencana kerja program kegiatan tahun 2020, peralihan pelaksanaan program Rastra, serta isu-isu aktual lainnya.

Bapak Ibu yang saya hormati,

Menurut laporan Sekretariat, saat ini baru dihadiri 18 anggota terdiri dari 9 fraksi. Jadi belum mencapai kuorum. Saya usulkan di skors dulu selama 5 menit, setelah itu kita lanjutkan. Setuju?

(RAPAT DISKORS)

Pak Dirut ini anggotanya kebanyakan di Badan. Ada di BKSAP, ada yang Baleg, ada yang Banggar. Jadi hampir mungkin 10 orang lebih yang lapor ke saya tidak datang hari ini karena kunjungan ke daerah. Ini kayanya agak-agak modus Pak Dirut, karena setahu saya BKSAP belum ada kunjungan ke luar negeri, kalau kunjungan ke dalam negeri beliau pasti enggak ikut.

(SKORS DICABUT)

Sesuai dengan ketentuan pasal 246 dan pasal 251 ayat 1 peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, RDP ini kami buka dan nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DI BUKA PUKUL: 10.30)

RDP pagi ini dimulai pukul 10.30 dan akan diakhiri pada pukul 14.30. apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan pasal 226 ayat 1 Tatib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau atas kesepakatan bersama dengan susunan agenda sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat
 2. Penjelasan Dirut Perum Bulog atas *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2019, rencana kerja, dan kegiatan 2020, peralihan pelaksanaan program beras Rastra serta isu-isu aktual
 3. Tanggapan anggota Komisi IV
 4. Jawaban Dirut Perum Bulog
 5. Kesimpulan
 6. Penutup
- Apakah acara ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Hadirin yang berbahagia.

Permasalahan dan tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan Indonesia menjadi isu multidimensi yang sangat kompleks. Aspek politik sering kali menjadi faktor dominan dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan pangan. Perubahan kebijakan pangan yang dahulu dijalankan oleh Perum Bulog sebagai operator Pemerintah dalam menyerap dan menyalurkan petani lokal dipaksakan dihapus. Digantikan oleh bantuan lainnya yang tanggung jawabnya berada di Kementerian Sosial. Lemahnya kepatuhan terhadap prinsip tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, tepat kualitas, serta tepat kuantitas, dan tertib administrasi dijadikan alasan yang kuat agar program Ban Rastra diberhentikan sepenuhnya dan diganti program Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT mulai akhir Mei 2019 yang lalu.

Program BPNT mulai aktif sejak tahun 2017 dengan skema bantuan berupa pemberian uang tunai sebesar 110 ribu setiap bulannya kepada Keluarga Penerima Manfaat atau KPM. Yang digunakan untuk membeli beras dan telur masih memiliki beberapa permasalahan. Salah satunya adalah tidak dapat disalurkan untuk 199.123 keluarga dikarenakan berkas tidak lengkap, data penerima *double* termasuk kategori keluarga mampu, meninggal, pindah, tidak hadir, dan menjadi TKI.

Berdasarkan ikhtisar pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan semester I tahun 2019 masih terdapat sisa BPNT yang belum diterima Pemerintah senilai Rp 213.000.000.000.

Hadirin yang terhormat,

Peran dan tanggung jawab Perum Bulog sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan Pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen sudah terbukti efektif dalam menekan angka inflasi masyarakat dan pembelian serta melindungi petani kecil yang rentan terhadap fluktuasi harga. Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kinerja Perum Bulog yang masih melakukan penyerapan beras petani lokal per tanggal 18 November sebesar 1.145 ribu ton.

Kami meminta penjelasan kepada Dirut Bulog terkait dengan upaya Perum Bulog dalam menyerap beras petani lokal dengan HPP yang telah ditentukan berdasarkan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2015. Rencana kerja perum Bulog menyalurkan beras petani lokal terkait dengan penghentian program beras Rastra. Dan usulan kebijakan pangan yang diharapkan Perum Bulog dalam mendukung penyerapan dan penyaluran beras petani lokal.

Saudara Dirut dan anggota Komisi IV yang saya hormati,

Demikian pengantar ini kami sampaikan, selanjutnya kami persilakan kepada Direktur Utama Perum Bulog menyampaikan penjelasan terkait hal-hal tersebut di atas. Pak Dirut silakan, sambil mengenalkan Direksi yang baru. Terima kasih.

DIRUT PERUM BULOG (Komjen. Pol. Drs. BUDI WASESO):

Bismillahirrahmanirrohim

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian.

**Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI,
Yang kami hormati anggota Komisi IV DPR RI.**

Memenuhi undangan Sekretaris Jenderal nomor PW 18303 DPR RI XI 2019 tanggal 11 November 2019 perihal undangan Rapat Dengar Pendapat. Dengan ini kami sampaikan penjelasan Perum Bulog mengenai evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2019, rencana kerja tahun 2020, peralihan program Bansos Rastra menjadi BPNT, serta tantangan kebijakan pangan dan solusi yang kami usulkan.

Namun sebelum kami melanjutkan perlu kami sampaikan kepada Ketua dan seluruh anggota Komisi IV DPR RI bahwa terhitung tanggal 19 November kemarin kami mendapat tambahan kekuatan Pak yaitu adanya jabatan WaDirut Bulog yang dijabat oleh Bapak Gatot Trihargo. Sebelumnya beliau adalah salah satu deputi di Kementerian BUMN. Dan kami lanjutkan.

Selanjutnya terkait penjelasan agenda rapat tersebut, dapat kami sampaikan sebagai berikut yaitu yang pertama, evaluasi tahun 2019. Realisasi pengadaan penyaluran dan ketersediaan tahun 2019. Sampai dengan tanggal 18 November 2019. Realisasi pengadaan beras dalam negeri Perum Bulog mencapai 11,1 juta ton. Sementara itu, realisasi penyaluran Bansos Rastra mencapai 352 ribu ton atau 99,62% dari pagu alokasi. Serta penggunaan cadangan beras Pemerintah atau CBP untuk program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga sebesar 445 ribu ton. Dan untuk bencana alam sebesar 4 ribu ton. Adapun jumlah stok beras yang dikelola oleh Perum Bulog saat ini yaitu mencapai 2,2 juta ton per tanggal 18 November 2019.

Dengan jumlah stok yang besar tersebut dan tersebar di seluruh Indonesia, Bulog siap melaksanakan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga sesuai dengan penugasan Kementerian Perdagangan untuk komoditas pangan lainnya per tanggal 18 November 2019 dapat kami laporkan sebagai berikut:

- a. posisi ketersediaan:
 - 1) gula mencapai 4,4 ribu ton;
 - 2) jagung 7,7 ribu ton;
 - 3) minyak goreng 1,4 kilo liter;
 - 4) daging kerbau 12,9 ribu ton serta;
 - 5) tepung terigu sebanyak 596 ton.
- b. Realisasi pelaksanaan anggaran tahun 2019. Perum Bulog memiliki fungsi untuk memperkuat pilar keterjangkauan dengan melakukan program perlindungan sosial untuk Keluarga Penerima Manfaat dalam bentuk program bantuan sosial Beras Sejahtera atau Bansos Rastra yang menggantikan sebelumnya yaitu program Raskin atau Rastra.

Selanjutnya mekanisme bantuan natura beras berupa Bansos Rastra tersebut mengalami perubahan arah kebijakan menjadi Bantuan Pangan Non

Tunai atau BPNT yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan PSO Perum Bulog sejak tahun 2015 hingga 2018. Segmen PSO terus membukukan penurunan pendapatan bahkan sampai dengan periode triwulan III tahun 2019. Segmen PSO mengalami rugi sebesar Rp 955.000.000.000.

Dalam APBN 2019 anggaran CBP dikelola oleh Kementerian Keuangan dan dialokasikan senilai Rp 2,5 triliun. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 88 PMK 02 2019 dengan harga pembelian beras masih sama dengan tahun 2018 yaitu sebesar Rp 9.583 per kilogram. Dalam hal pengelolaan CBP tersebut, kendala utama yang kami hadapi adalah pendanaan. Untuk pembelian gabah atau beras dalam rangka pemenuhan stok yang berasal dari kredit perbankan. Namun pembayaran kembali kredit tersebut baru dapat dilakukan setelah realisasi penjualan serta pencairan CBP yang tidak terlalu di awal tahun.

Selain itu, Harga Pembelian Pemerintah atau HPB sesuai dengan Inpres nomor 5 2015 saat ini juga semakin jauh di bawah harga pasaran umum. Memperhatikan hal tersebut, kami mengharapkan agar mekanisme pendanaan pengadaan stok untuk CBP dapat dilakukan melalui pemberian modal kerja awal tahun. Serta perlu segera dilakukan evaluasi HPB untuk menyesuaikan harga pasaran yang berlaku saat ini.

Terkait jumlah stok yang besar, kami juga mengharapkan dukungan untuk penambahan intensitas volume penyaluran dalam bentuk KPSH BPNT. Penyaluran kepada ASN dan pangsa pasar lainnya

Ketua, Bapak Ibu serta anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Yang kedua, Rencana kegiatan tahun 2020. Menyadari pentingnya pencapaian ketahanan pangan sebagai pilar bagi pembangunan sektor-sektor lainnya, kebijakan Pemerintah secara sektoral dalam ketahanan pangan sampai saat ini tidak dapat dilepaskan dari kebijakan per berasan. Bagi negara Indonesia, beras masih merupakan komoditas pangan yang paling strategis. Perum Bulog sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Perum Bulog yang merupakan alat Pemerintah untuk mendukung kebijakan per berasan nasional seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 5 tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh Pemerintah.

Simpul mata rantai ketahanan pangan dalam penugasan publik Perum Bulog adalah mencakup yang utama adalah:

1. Pengadaan dengan tujuan mengamankan stok beras yang sesuai Harga Pembelian Pemerintah dengan standar beras yang sesuai dengan Inpres yang berlaku yaitu Inpres Nomor 5 tahun 2015
2. Penyediaan atau penyimpanan, yakni mencakup dalam berbagai aspek ketahanan dan ketersediaan pangan manakala negara membutuhkan pasokan beras.
3. Perawatan stok dengan tujuan agar kualitas beras tetap terpelihara.
4. Pemerataan stok untuk mendukung ketersediaan stok beras di seluruh Indonesia sehingga menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan pokok yang tersedia di seluruh wilayah Indonesia.

5. Penyaluran stok yang didistribusikan melalui program Bansos Rastra, CBP golongan anggaran dan penyaluran lainnya.

Oleh karena itu sasaran kegiatan Perum Bulog yang akan diubah pada tahun 2020 secara garis besar, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Keberhasilan pelaksanaan penugasan Pemerintah;
2. Peningkatan volume bisnis
3. Bisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir
4. Penambahan kapasitas infrastruktur

Terkait dengan perhitungan struktur biaya harga pembelian beras Bulog oleh Pemerintah tahun 2020. Kami menggunakan asumsi persediaan awal sebesar 1,3 juta ton, pengadaan dalam negeri mencapai 1,6 juta ton. Dengan total penyaluran sebesar 1,6 juta ton sehingga nilai persediaan akhir mencapai 1,35 juta ton. Berdasarkan asumsi tersebut,

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Dirut kalau 1,35 juta ton itu ekuivalen berapa nilai rupiahnya kurang lebih?

DIRUT PERUM BULOG (Komjen. Pol. Drs. BUDI WASESO):

Kurang lebih 13 triliun Pak. Berdasarkan asumsi tersebut kami mengusulkan HPB tahun 2020 sebesar Rp 10.742 per kilogram. Dengan pengadaan gabah dan beras menggunakan fleksibilitas harga 10%. Menyadari pentingnya inovasi Perum Bulog yang juga saat ini secara bertahap memperkenalkan beras bersertifikasi melalui penyediaan beras sehat yang mengandung vitamin dan mineral pada jumlah yang cukup untuk selanjutnya akan disalurkan pada program kartu sembako dan CBP. Dengan program ini diharapkan kecukupan gizi masyarakat dapat dijaga hingga ke tingkat masyarakat yang berpendapatan rendah.

Selain itu kami juga mengembangkan sistem *e-commers* Bulog sebagai strategi untuk merambah bisnis ke pemasaran digital melalui aplikasi *panganan.com*. Selain menjawab tantangan sesuai dengan perkembangan yang terjadi sekarang, pemasaran bahan pokok melalui *platform Online* juga dinilai memiliki banyak kelebihan. Di antaranya dapat memotong mata rantai pasok distribusi yang terlalu panjang dan tidak ideal. Untuk bisnis ini Bulog telah menyiapkan infrastruktur modern dan meluncurkan 50 merek sebagai pilihan produk yang ditawarkan kepada masyarakat.

Bapak Ibu Pimpinan serta anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Yang ketiga, peralihan program Bansos Rastra menjadi BPNT. Sejarah bantuan sosial pangan di Indonesia mencatat beberapa perubahan penting mengenai arah kebijakan. Dimulai dari kegiatan operasi pasar khusus pada tahun 1998. Kemudian menjadi Raskin sejak tahun 2002 yang selanjutnya bertransformasi menjadi program Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT sejak tahun 2017 secara bertahap. Dan beralih seluruhnya sejak bulan September 2019.

Dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang terjadi di lapangan baik dari sisi agen, data, fasilitas, harga produk, dan *stakeholder* yang terlibat. Berdasarkan laporan keluhan yang dirangkum dari berbagai sumber di beberapa wilayah. Beberapa hal yang dapat menjadi perhatian utama di antaranya adalah keluhan harga beras, bantuan yang dinilai yang terlalu mahal, penyimpangan data, munculnya agen fiktif atau bodong hingga adanya intervensi dan kenakalan *supplier*. Keluhan-keluhan tersebut bagi kami dapat menjadi sebuah kesempatan sekaligus tantangan yang dapat kami tawarkan secara maksimal untuk program BPNT. Perum Bulog optimis dapat menjaga kepercayaan konsumen BPNT dengan menawarkan solusi dari kendala-kendala tersebut dan siap untuk melakukan perbaikan.

Yang keempat. Tantangan dan usulan kebijakan pangan.

Pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Dalam hal kebijakan pangan, posisi Perum Bulog berfungsi sebagai operator yakni menjalankan penugasan dari Pemerintah untuk menjaga stabilisasi harga produsen, menjaga ketersediaan pasokan, dan menjaga stabilitasi harga konsumen. Perum Bulog memiliki 3 kendala dalam pelaksanaan kebijakan pangan di antaranya yaitu:

1. Penugasan yang diberikan kepada Perum Bulog bersifat ad hoc tanpa jaminan kontinuitas;
2. Penugasan belum terintegrasi antara Kementerian dan Lembaga terkait;
3. Belum lengkapnya kebijakan turunan dari Perpres 48 tahun 2016 yang seyogyanya dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri terkait.

Untuk terus melaksanakan penugasan tersebut agar dapat berjalan sesuai prinsip *good corporate governance* dan mengurangi kerugian perusahaan akibat penugasan Pemerintah, Perum Bulog memerlukan 2, antara lain yaitu:

1. Penyerahan sepenuhnya pelaksanaan program BPNT kepada Perum Bulog sesuai dengan Inpres Nomor 5 tahun 2015 dan Perpres 48 tahun 2016. Untuk itu diperlukan Peraturan Menteri Sosial yang mengatur mengenai hal tersebut;
2. Terkait CBP sebanyak 150 ribu ton per bulan dengan menggunakan mekanisme secara langsung dari Bulog kepada 15,5 juta KPM melalui titik-titik distribusi tertentu yang tersebar di seluruh Indonesia.

Untuk itu diperlukan keputusan persetujuan dari Raker Menko Perekonomian yang kemudian akan disahkan oleh Menteri Perdagangan.

Yang ketiga. *Review* harga pembelian beras HPB, Pemeriksa yang berlaku saat ini yaitu Rp 9.583 per kilogram. Sudah berlaku selama 3 tahun sehingga tidak sesuai lagi dengan perhitungan HPB ditambah biaya-biaya yang berlaku saat ini. Untuk itu perlu segera di *review* dan disesuaikan oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dengan kondisi harga riil saat ini.

Yang keempat. Tindak lanjut kebijakan disposal stok atau (suara tidak jelas) stok yang di dukung dengan anggaran atas selisih harga. Perlu keputusan Rakortas atas jumlah dan perlukan disposal stok sekaligus

menunjukkan KPA untuk pembayaran selisih harga dalam pelepasan stok. Juga kami sarankan yaitu yang pertama, sinkronisasi harmonisasi kebijakan Pemerintah Lembaga yang mendukung tugas Bulog. Dan itu juga, pemberian modal kerja untuk pengadaan beras CBP. Karena selama ini pengadaan beras CBP kami menggunakan uang pinjaman dari perbankan. Kurang lebih sebesar 20 triliun. Penggunaan beras CBP untuk kartu sembako, kurang lebih untuk 15,6 juta. ASN, TNI, dan BUMN di penggunaan berasnya kami harapkan nanti menggunakan beras dari Bulog. Stabilisasi dan KPSA bencana alam.

Yang keempat, Bulog menyediakan beras bervitamin atau modifikasi untuk menanggulangi masalah *stunting*. Nah ini juga perlu kami sarankan sehingga Bulog mau mendapat satu dukungan untuk melakukan program tersebut. Kelima, pembentukan badan pangan sesuai dengan Undang-undang Pangan Nomor 18 tahun 2012.

Terakhir dapat kami sampaikan bahwa manajemen beserta seluruh jajaran Perum Bulog senantiasa berkomitmen untuk terus menjaga ketahanan pangan di negara ini di tengah beratnya tantangan yang dihadapi. Selanjutnya apabila masih diperlukan penjelasan lebih rinci, akan disampaikan oleh masing-masing Direktur yang membidangi. Atas perhatian dan dukungan dari Bapak Ibu Pimpinan serta anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Wabillahi Taufik walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Walaikumsalam.

Terima kasih kepada Direktur Utama Perum Bulog.

Saya memperkenalkan ada anggota baru di Komisi IV tapi stok lama. Silakan Mbak Wulan memperkenalkan diri.

F-NASDEM (Hj. SRI WULAN, S.E.):

Terima kasih Pimpinan

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Mitra yang saya hormati serta rekan-rekan yang saya hormati,

Perkenalkan, nama Sri Wulan dari partai Nasdem. Maaf ya Pak Darori dan Pak Indro. Dapilnya Jateng III, Pati, Blora, Grobogan, Rembang. Nah yang, makanya dari tadi kan "ah siapa ini yang bicara" begitu kan. Kayanya tergabung di KKP ya Pak? Nah salam nanti buat Pak Ketumnya di KKP, beliau tidak di sini kayanya. Dan saya ditugaskan dari kemarin tanggal 18 November, tapi sebelumnya izin karena memang ada keperluan keluarga dan hari ini *alhamdulillah* bisa bergabung dengan teman-teman. Semoga bisa memperkuat Komisi IV. Terima kasih. Barang lama stok baru atau stok lama barang baru ini? Makanya. Terima kasih semuanya.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih Mbak Wulan, semoga Mbak Wulan seperti anggota-anggota yang lain, datangnya lebih aktif.

Terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Dirut Bulog. Selanjutnya kami mempersilakan Bapak Ibu anggota Komisi IV untuk menyampaikan tanggapannya. Sesuai dengan ketentuan pasal 257 Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bahwa setiap anggota diberikan waktu 3 menit. Jadi jangan ngomongnya *ngalor ngidul* yang penting *to the point*. Untuk yang pertama Pak Mindo Sianipar, silakan Pak Mindo.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Terima kasih Pak Ketua.

Pak Buwas, dan teman-teman sekalian serta anggota Komisi IV.

Saya ingin merangsang kita berpikir. Jadi supaya tidak hanya saya yang bicara. Seperti sudah ada kesepakatan di kita secara nasional, Indonesia menjadi lumbung pangan dunia 2045. Nah kalau Indonesia menjadi lumbung pangan dunia 2045, 25 tahun lagi. Itu persiapan apa yang sudah kita lakukan? Kalau kita enggak bisa untuk diri kita sendiri saja, bagaimana kemudian dunia? Atau produk-produk apa sajakah yang bisa kita ciptai untuk dunia?

Nah tentu hal ini tidak bisa dilepaskan dari Bulog yang harus berpikir mulai dari sekarang. Apakah arak-arakan menyiapkan lumbung dunia dipimpin oleh Bulog atau dipimpin oleh badan pangan seperti yang tadi sudah disampaikan sedikit oleh Dirut Bulog. Dan bagaimana posisi Bulog beserta BUMN-BUMN yang lain? Saya kira itu kalau bisa kita curah pendapat sekalian pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih Pak Mindo. Selanjutnya Pak Kanjeng, silakan. Bukan KKN, habis ini Pak Suhardi karena tadi beliau minta duluan, ya Pak ya? Maaf ya Pak.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Ya, terima kasih Ketua.

Pak Bulog, Pak Ketua dan jajarannya teman-teman,

Saya ingin dari hati ke hati, Pak Buwas ya? Bapak ini termasuk orang kariernya bagus. Saya tahu, saya kira dari angkatannya yang bintang 3 bisa dihitung dengan jari, bahkan bintang 1 pertama saya tahu Bapak karena saya dulu kerja di pelanggaran hukum, terus ketemu Pak (suara tidak jelas) Pak Badrodin Haiti dulu Kapolda saya di Medan dulu. Saya tahu

perkembangannya. Dan saya ingin tahu ya bahwa Bapak duduk sebagai Ka Bulog itu tantangannya luar biasa. Salah satu tadi melaporkan bahwa untuk mengadakan beras impor itu uangnya pun pinjam bunganya komersial, satu.

Terus yang kedua, Bapak ditugaskan untuk menjaga ketahanan pangan yang stabil, yang ketiga Bapak diminta untuk untung dalam hal usaha. Tapi saya lihat seperti HPB saja sudah 3 tahun enggak naik. Bahkan Bapak yang seharusnya 1 hari 10-15 ton enggak selalu, paling 5-6 ton an begitu Pak ya?

Jadi sebetulnya Pak usul kita itu ingin Bulog itu diberdayakan. Tapi saya lihat Bulog ini, apalagi sekarang ada wakil. Tapi tangannya masih diikat, diborgol begitu. Saya ingin hati Bapak itu Bulog itu mau dihormati sebagai masa lalu itu apa? Bukan seperti tadi Pak, ada sesuatu yang Bapak rahasiakan. Tolong sampaikan, DPR bisa mendukung pada Pemerintah. Saya enggak setuju Bulog ini sampai mitranya itu lebih dari 1 Komisi di DPR ini. Ini modar mandir kiri kanan begitu.

Nah ada usulan tadi menarik. Bulog itu sesuai dengan Undang-undang 18 tahun 2012 menjadi Badan Pangan Nasional. Itu, kalau memang itu direalisasi, lalu dibawa Presiden Pak. Ini Bapak kan mondar-mandir ke BUMN, kesini, itu saya kira kalau memang betul dipercaya, nah mungkin kalau Bapak usulkan sendiri kurang enak Pak. Mungkin kalau di Komisi IV kami akan mendukung, merekomendasi, mudah-mudahan nanti dalam kesimpulan ada sesuatu yang saya katakan sehingga bisa untuk diteruskan di Pemerintah. Saya kira itu Pak. Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Selanjutnya Pak Suhardi Duka.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang saya hormati Pimpinan,
Anggota Dewan yang terhormat ,
Yang saya hormati Dirut Bulog beserta dengan seluruh jajaran.**

Kita ketahui bahwa Bulog ini peran yang sangat besar di dalam masyarakat utamanya petani dan tentu kita-kita semua yang satu kiblat. Saat ini saya melihat bahwa Bulog ini dengan peran stabilitas harga, pengendali inflasi, dan juga penolong petani dan UKM. Utamanya penggilingan beras dilemahkan, kemudian dilemahkan dengan cara-cara antara lain tentunya dengan memberikan kredit dengan bunga komersial. Saya kita salah satu cara melemahkan.

Kemudian penyaluran beras terbatas. Kalau Bulog lemah maka yang akan menikmati perdagangan beras atau pangan di Indonesia adalah mafia kembali, pedagang-pedagang besar. Impor menjadi alternatif, petani semakin tidak sejahtera. Olehnya itu saya melihat bahwa, kita Komisi IV ini perlu memberikan dorongan atau *support* agar Bulog kembali meningkatkan

perannya. Utamanya peran bisnis dan sosial karena Bulog ini 2 peran yang dimainkan. Utamanya di dalam penyerapan karena kalau Bulog tidak beli beras, petani jatuh. Pada saat panen maka harga padi masih turun, petani tidak tertolong. Saat kita panen harga beras naik, petani tidak bisa beli. Siapa tahu kalau petani ini tidak pernah menyimpan hasil pertaniannya, dia jual semua. Nah ini tidak sama seperti dulu ada tempat lumbungnya.

Yang kedua, juga penyaluran. Karena kalau tidak dikasih ibarat peran penyaluran, maka ya bisa saja beras yang ada di Bulog itu tidak tersalur. Olehnya itu kita berharap bahwa Bulog menjadi pusat pangan di daerah. Bisa mensupply sekalian. Tadi ASN, dulu waktu kita ASN kita bangga itu bawa beras, kita gandeng motor ke rumah, ini bahwa saya pegawai, yang lain kamu tidak bisa dapat seperti ini, ya kan dulu? Nah sekarang ini kenapa tidak dibegitukan kembali?

Dan *alhamdulillah* kemarin Sulawesi Barat sudah MoU dengan Bulog terhadap pegawainya dan semoga saja seluruh provinsi mengikuti ini. Dengan demikian bisa berjalan. Saya mendukung usulan HPB 10.742 per kilogram. Hanya pertanyaan saya apakah Bulog sudah mengukur pengaruh inflasinya? Karena bisa saja menaikkan inflasi. Dan Indonesia selalu menjadikan pangan menjadi faktor utama inflasi seperti beras, daging, bawang dan semua ini adalah produk masyarakat petani. Tidak boleh naik karena inflasi. Dengan demikian harga pupuk naik, boleh saja. Tapi pada saat harga naik sedikit, petani tidak boleh tekan karena inflasi. Harga pulsa naik, tidak pernah ditekan, ini juga kan mendorong inflasi. Jadi tidak adil kita kepada petani, Bapak-bapak dan Saudara-saudara.

Jadi kalau ini bisa dinaikkan, saya yakin petani akan menikmati harga yang baik, lalu menikmati harga yang baik. Dan dengan begitu juga penggilingan-penggilingan beras akan mendapatkan margin yang bisa menghidupi proses setiap tahunnya.

Yang terakhir adalah tentang tuntutan Undang-undang, Badan Pangan Nasional. Saya kira kemarin itu salah satu kesimpulan kita dengan Kementerian Pertanian, 3 bulan ke depan kita akan membentuk Badan Pangan Nasional karena itu bicara Undang-undang. Saya kira di sini lah mungkin juga peran Bulog nanti akan bisa kita berikan kewenangan yang lebih besar. Saya kira demikian, terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Hanya meluruskan Pak Suhardi juga kemarin waktu dengan Pak Mentan itu meminta selambat-lambatnya 3 bulan untuk dibentuk Badan Pangan Nasional.

Ya selanjutnya Pak Ono Surono, silakan.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Terima kasih.

**Pak Ketua yang saya hormati,
Pak Dirut Bulog dan jajarannya.**

Izinkan saya untuk menyampaikan ada satu masalah di daerah pemilihan Indramayu terkait dengan Bantuan Pangan Non Tunai. Jadi bulan Oktober kemarin ada perwakilan hakim-hakim datang ke DPRD Kabupaten Indramayu. Saya bacakan Pak resumenya apa.

“Berita acara pengaduan program BPNT bulan September 2019 perwakilan Forum Agen 46 Kabupaten Indramayu”. Poinnya saja saya bacakan.

Terjadi intimidasi dan ancaman kepada agen 46 yang dilakukan oleh Kabid PFM Binsos Indramayu, Saudari Aam Aminah. Untuk intimidasi dan ancamannya sebagai berikut:

- a. Akan diputus keagenan apabila agen apabila agen di warung tidak mengambil beras dan telur dari Bulog dan diancam di pidana kan.
- b. Memaksa PKM untuk tidak mengambil beras dan telur dari agen yang tidak mengambil beras dan telur dari Bulog,
 1. agen dipaksa menandatangani MoU kesepakatan dengan Bulog dengan isi kesepakatan yang merugikan dan memberatkan agen (bukti terlampir).
 2. Dirkokam. Ikut serta menentukan harga beras dan telur Bulog (bukti terlampir).
 3. pada bulan September 2019 ketika saldo BPNT sudah bisa ditransaksikan, pihak Dirkokam menahan PKM dan agen di warung untuk tidak melaksanakan transaksi BPNT dengan alasan belum adanya kesepakatan dari Bulog.
 4. Bulog menjanjikan beras kualitas premium dengan harga 10.200 per kilogram tetapi pada kenyataannya beras diberikan dengan klasifikasi tidak layak konsumsi. Barang bukti beras Bulog
 5. Kabid PFM Dinsos Indramayu, Saudari Aam Aminah melakukan sidak ke beberapa agen di Kecamatan Krangkeng yang menyalurkan beras non Bulog dan membubarkan paksa PKM yang sedang melakukan pencairan BPNT. Kabid PFM memberikan ancaman agen di warung dengan ancaman akan memutus keagenan. Pihak Dinsos juga memberikan edukasi kepada KPM yang bertujuan mendiskreditkan agen di warung. Demikian, ditandatangani perwakilan.

Nah kenapa saya membacakan ini? Mungkin diawali dengan apa yang kita putuskan bersama antara Bulog dengan Komisi IV di mana Komisi IV mendorong Bulog sebagai pemain tunggal lah untuk distribusi program BPNT. Karena pada saat itu Bulog mempunyai stok yang sangat besar. Dan pada saat itu Kementerian Sosial membebaskan. Sehingga pernah juga saya sampaikan di beberapa Kabupaten/Kota ini terjadi persaingan antara Bulog dengan pemain lainnya. Saya titikberatkan pada saat itu di Indramayu ada BUMD yang namanya Bumi Wiralodra. Yang merupakan mitra sebenarnya dari Bulog yang juga menjadi pemain, pemasok beras ke agen-agen atau di warung-warung.

Nah dengan adanya surat edaran itu, BWI ini pada akhirnya fokusnya untuk mensupply ke Bulog. Jadi tetap sebenarnya beras yang disalurkan oleh Bulog Indramayu ke warung, tetap dari BWI. Nah sekarang isu yang terjadi bahwa setelah Bulog menyalurkan ke warung, kualitasnya ini jelek sehingga Bulog ini lebih di diskriminatifkan lah di Indramayu. Yang dimainkan oleh oknum, mohon maaf, ada Pemda dan ada dari PD BWI itu sendiri. Nah

sehingga dengan adanya kasus ini menurut saya perlu ditindaklanjuti oleh Pak Direktur jangan sampai ini pun terjadi di daerah-daerah lainnya.

Jadi intinya ada persaingan. Nah sehingga pada saat bicara, saya tanya ini, sebenarnya beras yang disalurkan yang jelek itu dari mana? Ya tetap dari BWI itu yang PD yang BUMD itu. Nah *insyallah* nanti Sabtu depannya lagi saya akan turun ke Indramayu, ke Dapil. Mohon ada dari Bulog mendampingi saya Pak. karena isu yang dikembangkan juga oleh mereka, ini juga kesalahan Komisi IV. Komisi IV yang mendorong pada akhirnya keluar surat edaran yang Bulog untuk memasok di warung. Nah saya pun akan mengklarifikasi bahwa intinya bahwa Bulog pun untuk memasok di warung (suara tidak jelas) BUMD dengan kualitas yang standar yang harusnya juga ya perlu kita dukung begitu kan.

Nah jadi sekali lagi, saya mohon. Sabtu tanggal 28 apa 29 saya akan turun ke Dapil, mohon dari Bulog bisa mendampingi saya. Terima kasih Pak.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih Pak Ono.

Kalau bisa nanti di catatannya diberikan kepada salah satu Direksi Bulog saja supaya jelas. Selanjutnya Pak Sunarna, silakan.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Pimpinan Bulog dan seluruh jajaran Bulog.

Saya sedikit saja bahwa kita bicara dari masalah BPNT. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ono juga bahwa kita juga melihat ke belakang. Saya juga bahwa beras Rastra itu belum diberikan kewenangan penuh. Tidak pernah benar berasnya. Jadi Pak Direktur saya minta juga tolong dikoreksi. Pasokan Bulog ini dikoreksi dari atas sampai bawah. Kalau memang nantinya sepenuhnya mau *supply* masalah beras BPNT ini yang kalau kita dengar lebih sedikit permasalahannya dibandingkan dulu waktu Bulog melaksanakan beras Rastra. Buka sering Pak, karena dulu saya juga pimpin 2 kali sering diundang di Kemsos, di Kemenhan juga. Bahwa kenapa ini sebenarnya masalahnya di mana?

Jadi (suara tidak jelas) itu tidak akan pernah berubah. Kita memberikan masukan atas permasalahan yang ada, di daerah pun masalahnya sama terus. Dan apabila sekarang yang dilaksanakannya BNPT ini lebih baik, mengganti kemasan untuk ikut serta. Ini juga berjalan berasnya pun juga baik, kenapa tidak? Kalau permasalahannya ada tentu ini dari pihak pengawasannya. Kalau Bulog mau melakukan ini ke depannya, tolong diperbaiki manajemennya juga Bapak. Jadi bukan hanya kelihatan dari atas baik, tapi pelaku lapangan Bapak juga baik, Bapak.

Ibu saya bos beras loh dulu, juragan beras desa. Jadi kalau berat Rastra keluar ke bawah, itu akan dikumpulkan, Bapak. Ibu saya bisa beli separuhnya nanti akan masuk ke Bulog lagi, Bapak. Nah campur lagi, keluar

lagi. Dan saya biasa Pak masih suruh *nyupirin* truk Ibu saya untuk mengangkut beras Rastra dari Bulog itu. Dan gudangnya Ibu saya sampai sekarang masih Pak. Gapleknya juga masih banyak, jagung masih banyak karena memang Ibu saya memang pedagang polorejo.

Nah tentunya ini yang sudah berjalan baik tolong dibantu, yang belum Pak, tolong juga di perbaiki yang belum baik, yang sudah baik *monggo* dijalankan dengan baik. Apabila nantinya (suara tidak jelas) ini ke Bulog, bagaimana juga trauma masyarakat ini. Masyarakat miskin yang sudah puluhan tahun terhadap beras Bulog ini. *Imagenya* loh Pak, *image* ini kan tidak gampang. Tidak bisa mengalihkan setahun, dua tahun, terus beralih keyakinan tinggi terhadap Bulog. Kalau sudah dengan Bulog itu rakyat miskin itu sudah alergi . “ah mending kita jual saja, *wong enggak enak*” begitu kan. Mereka juga bikin enak Pak. jadi orang sekarang ini, biarpun orang miskin juga ingin beras pulen Pak. jadi kalau beras pulen mungkin semua yang dijalankan sama.

Terus selanjutnya Bapak, terkait tadi saya melihat pergudangan Bulog ini luar biasa loh Pak. tentu kita juga perlu mengembangkan untuk bisnis *pure*. Kalau saya melihat ini juga saya yakin Pak Direktur akan, Bulog ini akan mudah dengan berbagai *supply* produsen produk yang ada di negara dan bangsa kita. Apa tidak sebaiknya juga bahwa Bulog ini mengembangkan bisnis murni juga (suara tidak jelas) Kenapa kita tidak seperti mereka? Karena kekuatannya penuh. Bulog juga bagus-bagus di mana penggudangan tidak perlu. Sudah ada. Dan kita tinggal membuat kebijakan saja bahwa bagaimana ini percepatan bisa dilakukan. kalau perlu anggaran cukup, ya karena itu bisnis *pure*, untung juga saya yakin lebih bisa. Pemerintah juga dengan swasta lebih kuat Pemerintah dan lebih bisa memerintah. Regulasinya pun juga bisa kita bikin agar lebih cepat. Karena di mana pun dimana-mana kalau Bapak lihat, Pak Direktur di warung juga bagus-bagus saja, mereka juga izin saja swasta. Kenapa kita yang negara tidak bisa melakukan? Saya yakin itu bisa.

Itu saja Bapak Pimpinan dan juga Pak Direktur atas pertanyaan juga masukan dari saya. Juga pertanyaan dari saya, bagaimana bahwa kalau BPNT ini nantinya Bulog mau berperan di sana, ikut masuk semuanya tolong bahwa yakini trauma orang miskin ini terhadap Bulog ini bisa nantinya dihilangkan dan Pak Direktur bisa meyakini bahwa strukturnya ke bawahnya yakin “eh jangan main-main, jangan macam-macam” dan dia harus baik, berasnya harus bagus, yakin nanti dosanya banyak Bapak. Jadi karena petani juga perlu,

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Cukup Pak Surnarni, cukup.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Siap. Cukup Pak Pimpinan. *Matur nuhun*.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Merdeka! Selanjutnya Pak Muslim, silakan.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Terima kasih Pak, Pak Ketua.

Pak Ka Bulog serta jajarannya,

Pertama, saya singkat saja Pak Buwas, berkaitan dengan Bulog ini. Terus terang memang kalau saya lihat selama kepemimpinan Pak Buwas ini kan stok beras nasional sampai hari ini sudah sekitar 2,3 juta ton ya. Artinya bahwa tidak perlu ada impor lagi. Ini saya pikir ini satu hal yang perlu kita apresiasi bahwa stok nasional bahkan di sebuah media Pak Buwas sampaikan bahkan kita mau jual ya 1 juta ton kalau ada yang beli sekarang ya. Artinya bahwa ini kan surplus.

Cuma persoalan hari ini adalah ketika ada temuan di masyarakat ini Pak Buwas ini, ini menjadi koreksi buat kita semua. Mungkin teman-teman sudah menyampaikan tadi ketika pembagian Raskin. Ini Raskin ini saya tidak tahu itu beras dari mana di ambil, ternyata kualitas Raskin yang dibagikan ke masyarakat ini apakah stok lama atautah dari mana barangnya. Ini mungkin bisa dijelaskan. Itu rata-rata itu kadang-kadang ada yang sudah berkutu dan macam- macam. Itu akhirnya kan tetap korbannya di masyarakat, Pak. ini mungkin hal yang sangat penting ya.

Kemudian yang kedua tentu saya melihat dari paparan Pak Buwas tadi sudah modern segala macam tentu kita berharap disamping sebagai stok nasional, saya pikir harus melakukan inovasi-inovasi. Jadi sehingga beras-beras yang dihimpun oleh petani, yang kita harapkan selama ini kan terjadi terus Pak. Ketika panen besar, panen raya itu Pemerintah mengimpor, nanti petani jadi korban. Bahkan seperti tempat saya di Aceh beras berapa ratus ribu itu lahan-lahan pertanian itu kadang-kadang hanya menunggu tadah hujan. Kan setahun sekali kan. Padahal kan Aceh pernah swasembada pangan dan lain-lain.

Artinya kita berharap dengan adanya Bulog ini juga bisa bekerja sama dengan Kementerian Pertanian ini bagaimana membuat suatu mekanisme. Jadi kita harapkan kita akan surplus kita akan ekspor terus. Selama ini kan kita lebih banyak mengambil dari Vietnam iya kan? Dari Thailand dan lain-lain. Ini mungkin perlu langkah-langkah strategis dari Pak Buwas nanti dengan banyaknya stok ini kita juga cari solusi. Selama ini kita mengimpor kenapa kita menjadi ekspor ke depan. Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Walaikumsalam.

Selanjutnya Pak Guntur silakan.

F-PD (Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.):

Terima kasih.

**Pimpinan yang saya hormati,
Dirut Bulog beserta jajarannya yang saya hormati,
Dan teman-teman.**

Komisi IV ini dulu pernah membuat kesimpulan untuk melarang impor tapi dari pihak sana tetapi melaksanakan impor beras. Karena kebijakan Pak Buwas ini lah akhirnya sekarang kita lebih mempunyai stok beras. Pertanyaannya, kita memang harus berhati-hati di dalam rangka mengartikan suatu definisi. Pertanyaan kami satu, karena definisi ini selalu disalahartikan sesuai dengan kepentingan. Dulu terjadi karena Menteri secara teknis tidak terlalu dilibatkan di dalam rangka wewenang impor. Kemudian yang kedua, data-data yang disampaikan juga sesuai dengan kepentingan. Ini bersembunyi di kata-kata yang saya sampaikan sekarang ini. Satu, demi ketahanan pangan. Dua, demi kemandirian pangan. Ketiga, demi kedaulatan pangan. Keempat. Demi ketersediaan pangan. Yang terakhir tadi ketersediaan panganlah yang menjadi akhirnya kemarin impor. Saya mohon supaya tidak terjadi dilegitimasi tentang perkataan ini mendapat jawaban dari Dirut Bulog.

Yang kedua, Bulog di dalam peranannya tetap sebagai BUMN yang harus meminjam dana dari (suara tidak jelas). Pihak di luar juga harus punya modal pinjam dari bank. Artinya ini Dirut Bulog juga sama dengan pengusaha luar. Dan di mana posisi stabilitas harga bisa dimainkan oleh Bulog. Pada posisi ini lah Bapak akan selalu terbawa kepada masalah-masalah yang sangat peka dan rumit untuk penyelesaiannya. Saya sangat berharap kira-kira Undang-undang nomor 12 tahun 2012 yang mengamanatkan Badan Pangan Nasional, yang harusnya sejak tahun 2012, 2 tahun kemudian sudah bisa diwujudkan sampai dengan sekarang belum bisa diwujudkan. Ini kami mendesak untuk Bapak *action* dalam hal ini.

Yang ketiga. Penambahan inkonsitas dalam bentuk KPSH kepada ASN yang tadi Bapak sampaikan. Saya khawatir karena ASN, TNI, Polri itu selalu menerima apa yang diberikan oleh Pemerintah. Kembali kepada zaman dulu, beras-beras jelek diberikan kepada pegawai negeri dan TNI. Kami mohon kiranya harus hati-hati. Jangan kita *setback* kepada yang lalu. Saya juga bertanya alangkah baiknya kalau *toh* kelebihan-kelebihan ini mencoba untuk dapat di ekspor kembali. Sekali-sekali kita harus bangga Indonesia mengeksport beras. Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Guntur saya hanya menjelaskan sedikit kepada Dirut Bulog. Kita Raker terakhir dengan Kementerian Pertanian mengatakan sampai akhir tahun akan menyerap, akan ada hasil panen sekian ton sekian ton. Setahu saya sekarang belum masanya panen Pak. belum juga masanya tanam. Kemarin saja data yang dari Kementerian Pertanian dan data dari BPS bedanya 10 juta. Entah 10 juta itu ada di langit atau di dalam laut kami

enggak tahu. Jadi yang penting adalah data yang valid bukan data yang katanya atau data yang kepentingan Kementerian, itu Pak
Selanjutnya Pak Rudi, silakan.

F-PAN (MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.):

Terima kasih Ketua Pak Sudin.

Pak Direktur Bulog dan jajarannya.

Saya Rudi daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat I, Pulau Sumbawa. Jadi saya enggak menyebut Lombok karena tidak masuk ke Dapil saya. Pak Direktur Utama, ini saya lihat ada Keluarga Penerima Manfaat ini di Nusa Tenggara Barat 481.268, ini berkaitan dengan Dapil. Mungkin ke depannya untuk anggarannya ke depan saya mungkin minta datanya di Pulau Sumbawa ya. Jadi (suara tidak jelas) jadi bukan Lombok. Jadi saya bertanggung jawab ke Pulau Sumbawa.

Kemudian program keluarga harapan ini kalau enggak salah di bawahnya Depsos tetapi yang memberikan adalah dari Bulog. Jadi sekarang bagi saya ada catatan menarik masalah (suara tidak jelas) yang ke depan jika ada distribusi dari Bulog, kami atau minimal anggota DPR Komisi IV yang ada di Dapil tersebut dikordinasi kan karena penyampaian itu sering di klaim dari Komisi yang lain. Nah ini penting sekali saya sampaikan terutama buat kami-kami di Indonesia Timur yang susah jangkauannya dari Jakarta.

Kemudian bantuan petani non tunai juga. Kembali lagi saya minta atau mohon bantuan ketika Bapak-bapak ini menyalurkan nanti kiranya kami khususnya yang ada di Komisi IV ini dapat diajak untuk berkoordinasi agar kami menyampaikan bahwa ini ada karena Pemerintah Pusat melalui inisiasi kami yang ada di Komisi IV ini.

Kemudian Pak Direktur Utama, kemudian saya meminta agar tetap dilaksanakan monitoring harga. Ini kalau Jawa, Sulawesi, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, NTB ini 9.450 untuk medium terus (suara tidak jelas) agar monitoring harga ini bisa tetap stabil karena terus terang di Nusa Tenggara Barat baik di Lombok maupun di Sumbawa itu sangat terkenal sekali dengan lumbungnya. Jadi jangan sampai juga karena banyak produksi harganya tidak memadai sehingga opini masyarakat tidak begitu menarik.

Kemudian yang terakhir mungkin, Direktur Utama dan jajarannya. Saya mengajak untuk kunjungan kerjanya di NTB di Pulau Sumbawa ya Pak, jangan sampai salah. Jangan di Pulau Lombok. Saya di Pulau Sumbawa Dapilnya. Sekali lagi jangan-jangan nanti suka salah soalnya. Itu mungkin yang paling penting saya sampaikan ini untuk kepentingan daerah pemilihan saja karena sangat jauh dari Jakarta. Terima kasih Pak.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih Pak Rudi. Selanjutnya Pak Made Urip.

F-PDIP (Drs. I MADE URIP, M.Si.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

Salam sejahtera buat kita semua

Om swastiastu.

Pimpinan yang saya hormati.

Rekan-rekan Komisi IV dan,

Bapak Dirut Perum Bulog yang saya hormati.

Jadi kalau apa yang disampaikan oleh teman-teman kita cukup prihatin dengan kondisi Bulog seperti sekarang ini. Karena kalau kita melihat perlakuan yang jujur dari Pak Dirut Perum Bulog baru bangun pagi sudah memikirkan 8 miliar baru bangun dan 6 miliar untuk dana operasional. Nah ini cukup memprihatinkan seperti hidup dan mati enggak mau Bulog ini. Nah kondisi ini tentu kita perlu cermati bersama karena Bulog ini aset.

Sebagai BUMN, BUMN itu adalah *agent of development* ya, jadi agen pembangunan. Maka itu, tugas kita utama adalah bagaimana menyelamatkan Bulog ini Pak terutama berkaitan dengan status yang jelas. Status Bulog ini yang saat sekarang sebagai Perum. Dibandingkan dengan dulu ketika dia sebagai LPND Lembaga Pemerintah Non Departemen. Begitu sebagai LPND belum karena dibiayai oleh negara, oleh PPN ya luar biasa Bulog itu sampai ke daerah-daerah terutama sampai ke KUD itu.

Nah kemudian berubah menjadi Perum. Dia punya tugas fungsi publik dan fungsi komersialnya. Nah dan juga ditugas oleh Pemerintah sebagai operator. Jadi ditugasi untuk menghimbau gula, jagung, kedelai, daging misalnya. Tugas itu sangat berat sekali. Kemudian dipotong misalnya dengan distribusi beras itu tidak jalan sampai sekarang. ASN misalnya, golongan anggaran terutama yang dulu itu adalah menjadi sasaran Perum Bulog, sekarang tidak jalan itu.

Maka itu kita berharap kepada seluruh hadirin Komisi IV, status Bulog ini perlu dikaji betul karena amanat Undang-undang yang berkaitan dengan pangan, sudah diamanatkan di sana itu adalah Badan Pangan Nasional. Barangkali Bulog ini harus menjelma menjadi Badan Pangan Nasional ini, begitu. Nah jadi lebih kuat status Bulog kalau kembali kepada Badan Pangan Nasional sesuai amanat daripada Undang-undang Pangan kita ini. Jadi APBN akan membiayai seluruh apa kepentingan-kepentingan Bulog ini sehingga juga penugasan-penugasannya.

Nah maka itu saya rasa ke depannya perlu dikaji ini oleh kita semuanya. Maka itu tugas-tugas pengkajian ini barangkali perlu kita lakukan terutama kita di Komisi IV ini karena kita sangat berkepentingan sekali dengan Bulog supaya jangan sampai terjadi seperti sekarang ini. Kalau kita tinjau di lapangan terutama petugas-petugas Bulog di daerah itu cukup prihatin dia sekarang Pak. jauh dibandingkan dengan dulu yaitu pegawai-pegawai Bulog itu sekarang pada kere-kere Pak, terus terang saja. Jadi di Balai saja dalam lingkup yang kecil itu sudah agak berpengaruh betul tentang kondisi Bulog pada saat sekarang ini.

Nah untuk ada terobosan-terobosan di daerah yang memang (suara tidak jelas)nya bagus, fungsi komersial ini jalan. Seperti di Bali misalnya dia membeli bawang merah di daerah ... itu sendiri, ketika jatuh harganya dia simpan. Nah ini cukup bagus mendapatkan *profit* dari sana. Jadi kalau kita lincah, petugas Bulog di lapangan tidak punya pikiran yang sifatnya *entrepreneur*, saya rasa tertinggal dia.

Jadi saya mengajak pada rekan-rekan mari kita kaji bersama tentang status Bulog ini ke depan mau kita bawa ke mana. Tentu arah kita bersama adalah amanat Undang-undang Pangan ini, pembentukan Badan Pangan Nasional ini. Bulog adalah sebagai salah satu pilar penyangga pangan nasional ini harus kita selamatkan tidak seperti sekarang ini. Bapak Dirut tidak pusing 8 miliar baru bangun, 6 miliar dana operasional. Jadi betul-betul memprihatinkan kita bersama tentang Bulog ini.

Nah selanjutnya tentang tugas yang lain yaitu pembelian gabah petani misalnya. Yaitu kalau tidak sesuai dengan HPP, tugas Bulog untuk membeli itu. Selama gabah kering panen di tingkat para petani kita, biar sesuai dengan HPP. Nah cuman Satgas-satgas Bulog ini kurang bergerak ke bawah untuk membeli itu. Kita pahami betul karena dia mengandalkan ya apa, kredit komersial juga berat untuk membiayai semuanya ini. Nah maka itu ini perlu ini dicarikan jalan untuk penyelamatan Bulog kita ke depan ini.

Yang ketiga adalah gudang. Gudang-gudang di daerah ini banyak yang sudah (suara tidak jelas) *low* Pak, yang sudah tidak sesuai lagi. Itu perlu revitalisasi tentang pergudangan ini atau penambahan gudang-gudang baru di daerah sentra-sentra produksi. Jadi barangkali ini perlu dipikirkan, kita bersama. Saya setuju tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Guntur bagaimana sasaran golongan (suara tidak jelas) ini TNI Polri ini kalau bisa kita masuk lagi supaya distribusi Bulog terutama beras yang di gudang. Misalnya CBP misalnya atau yang lainnya bisa tersalur dengan baik sirkulasi ini. Karena untuk memelihara beras yang ada di gudang itu apalagi sampai di atas 1 juta, biayanya cukup mahal itu, mahal betul itu. Dan juga terlalu lama akan mubazir. Mau diapakan beras ini? Nah itu.

Nah maka itu mari kita pikirkan bersama bagaimana mencari terobosan untuk membenahi daripada Perum Bulog seperti sekarang ini kita hadapi. Jadi ini adalah hasrat nasional kita yang harus kita selamatkan. Barangkali itu Pak Ketua dan terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih senior.
Selanjutnya Pak Budhy Setiawan, silakan.

F-PG (BUDHY SETIAWAN):

Iya terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati jajaran Komisi IV dan juga Dirut Perum Bulog beserta jajarannya.

Pertama, peran Bulog ini sebagai operator memang tidak harus sepenuhnya menjadi operator saja. Menurut saya, sebagai negara antara

kedua dan ketiga kita penghasil beras terbesar di dunia dan Bulog cuman sekedar operator dari tahun berapa sejak didirikan, operator terus. Mesti diperkuat dengan fungsi Bulog juga memiliki fungsi reguler Pak. Komisi IV harus bisa mendesak Pemerintah. Tidak hanya Bulog dari awal berdiri sampai sekarang sekedar operator. Karena kalau sekedar operator dengan beban yang sekarang diberikan kepada operator ini untuk bisa berfungsi tidak sebagai sebatas Perum tapi nyaris sudah seperti perseroan terbatas.

Jadi di mana letak *fairness* terhadap sebuah Lembaga yang sangat strategis ini? Hanya disuruh menjadi operator tapi fungsinya sudah mirip perseroan terbatas. Harus mencari modal kerja dari modal yang komersial. Kita harus memberikan penguatan kepada Bulog yang sudah lama berdiri, menjaga stabilisasi baik itu pasokan, stok, maupun harga beras yang sudah lama berdiri, ini tentunya sudah lebih statis. Tentunya harus diperkuat. Kita negara penghasil terbesar antara kedua dan ketiga. Dukungan Komisi IV harus jelas kepada Bulog ini.

Berikutnya tapi merupakan koreksi Pak Direktur dan jajaran. Kalau kita melihat komentar rekan-rekan Komisi terkait dengan peran Bulog di BPNT Pak. karena dari Raskin ke Rastra kemudian ke BPNT ini sebenarnya ada kekurang-tebalan dari Bulog Pak. Makanya Mensos, Kementerian Sosial lebih mengarahkan kepada BPNT ini karena memang peran Bulog di dalam penyaluran ini ya tadi (suara tidak jelas) nya itu memang agak kurang Pak di situ. Tentunya ini *setback* ke belakang dari kepemimpinan Direksi yang sekarang ya. Tapi di Direksi sekarang ini saya pikir, di dalam pengadaan BPNT ini siapa pun bisa mengatakan Pak, itu. Tetapi kan barangnya dari Bulog Pak. jadi enggak perlu juga Bulog harus ikut melakukan penekanan bagi pengusaha-pengusaha lokal yang ingin terlibat di dalam BPNT ini. Karena BPNT ini bisa menumbuhkan apa namanya, kalau partisipasi lokal, perusahaan-perusahaan lokal. Tapi kan pasokannya bisa dibantu oleh Bulog.

Demikian tanggapan dari saya. Mohon tanggapan juga dari Bapak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih Pak Budhy.

Selanjutnya Pak Haerudin. Ingat waktunya 3 menit.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Siap Bapak Ketua yang rajin dan bijaksana.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Dan gagah berani.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Pimpinan Ban serep.

Ya memang ini lah kenyataannya. Kita ini kritik-in pemateri yang cuman 3 menit, ini untuk internal kita. Mohon maaf dulu Pak. Kita juga butuh evaluasi terhadap kita enggak keras sama mitra. Di internal kita juga Pimpinan kita harus dibicarakan lebih serius. Enggak mungkin kaya begini

alur kita. Baru saja sebulan. Nanti kalau guru kencing berdiri, murid kencing *abret-abretan* Bapak Sudin. Bisa begini kita nanti.

Pimpinan yang kami hormati, Bapak Ketua sama Bapak sementara, Pak Darori.

Dan anggota yang kami hormati.

Tentu kami tidak banyak yang akan kami sampaikan karena waktunya terbatas. Tapi ini baru asumsi Pak. mungkin Bulog sedang kebingungan antara *supply demand* nya enggak jelas. Kalau dalam bahasa orang lain, banyak (suara tidak jelas) yang jadi korban Bulog atau terlibat yang dulu, tapi mudah-mudahan yang sekarang *clear*.

Jadi yang kedua, pernyataan Pak Ahmad Alamsyah Saragih ya, per bulan Februari 2019 dari ORI, Ombudsman Republik Indonesia itu. Dia menyebutkan bahwa kalau Bulog merugi terus, itu Bulog bisa diganti dengan perusahaan murni. Kira-kira Bulog menjadi (suara tidak jelas) . menurut saya ada benarnya, ada tidak bijaksana *statement* itu. Tapi paling tidak itu sebagai pelecuk kita bagaimana menjadi evaluasi yang lebih besar.

Yang kedua Pak, apa tidak mungkin kalau kita koordinasi dengan Mentan dan Indag. Jadi tolak ukur impor beras itu harus ada apa yang dibutuhkan di kita dan itu kewenangannya ada di Kementerian Pertanian dan ada di Bulog. Masa Indag akan bandel terus kalau Kementerian Pertanian dan Bulog diam. Ini untuk membela uang negara Pak. Hari ini orang menyebut tentang pembusukan di gudang karena kita susah di distribusi. Karena padi itu mengandung kandungan air yang besar.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Haerudin, bukan pembusukan terjadi. Bukan pembusukan, beda.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Terjadi pembusukan, nanti jadi busuk. Karena kelembaban mungkin Pak, jadi kalau kandungan airnya tinggi beras itu berarti lembapnya akan tinggi dan cepat busuk. Saya pikir begini, kualitas beras yang diimpor apa yang disebutkan oleh teman-teman tadi bahwa di lapangan beras kita, beras Bulog itu tanda petik dipertanyakan orang kok buruk dibanding beras yang lain. Itu juga jadi korban yang negatif bagi beras Bulog sendiri. Nah mungkin ke depan ada alat yang lebih canggih bagaimana beras punya daya tahan yang lebih lama.

Yang ketiga, ini yang terakhir dari saya Pak. kompetisi terbuka tentunya akan berisiko juga bagi Bulog. Dan hari ini sudah dalam ruang kompetensi terbuka kita ini. Kalau di dunia kita, di dunia per berasan kita. Memang bukan hanya Bulog satu-satunya. Jadi kita punya kompetitor yang lain. Dan kompetitor yang lain juga sama lobi nya ke Pemerintah juga. Saya pikir begini, dalam satu atap sebuah kabinet, beras bisa mengambil dari mana pun padahal belum sedang butuh pasar bahkan pasar Bulog nya yang dipotong. Taruh lah yang jadi hari ini BPNT itu ya. Nah kira-kira Kemensos itu harusnya dengan Bulog kerja sama. Jadi rakyat tertutupi kebutuhannya, Bulog kelar salurannya.

Nah kira-kira ini ada hambatan di internal birokrasi kita, di arah kabinet harus diperbaiki Pak Direktur Utama, Pak Buwas. Bagaimana komunikasi yang canggih dari Pak Buwas, maka apakah itu bisa ditahan dulu? Masa yang begini enggak bisa diurus? Aku percaya sama Pak Buwas.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Walaikumsalam.

Kalau koordinasi sudah dimulai, Pak Haerudin. Antara Pak Dirut dengan Mensos. Cuma tinggal tunggu waktu pasti jumpa Pak. barusan saya WA Pak Mensos nya.

Selanjutnya Pak Endro Hermono.

F-GERINDRA (Ir. ENDRO HERMONO, M.B.A.):

Terima kasih Ketua.

Bapak Dirut beserta jajaran yang saya hormati.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

Berbicara masalah Bulog ini memang menarik karena kejadiannya adalah hari-hari di sekitar kita. Yang cukup suaranya bisa ke masyarakat, dan masalahnya juga banyak. Salah satunya adalah kebijakan dari yang tidak selaras. Kemudian sulitnya menjaga mutu dari beras dan sebagainya dan sebagainya. Begini ya Pak, tapi izinkanlah saat sekarang saya ingin menyadarkan permasalahan yang ada . kalau tidak salah, mohon maaf. Bahwa fungsi dari Bulog ini adalah yang pertama, stabilisasi harga pangan khususnya beras. Dan yang kedua adalah menjaga stok pangan nasional. Ini yang paling pokok. Ini kalau enggak salah, mohon maaf.

Kalau melihat dari itu Pak, saya sebagai Badan yang juga ikut juga mengawasi kadang-kadang menilai kinerja Bulog itu juga bingung juga, karena apa? Karena beberapa bulan yang lalu pernah kita rapat dengan (suara tidak jelas) Bulog. Ada yang menyertakan penyerapannya dari masyarakat hanya 10%, 15%, ada yang 20%, enggak ada yang tinggi. Tetapi apakah bisa kita menyertakan dia salah? Karena memang harganya itu sudah, sudah di atas ketentuan. Ibaratnya petugas kebakaran bertugas tapi enggak ada kebakaran. Apakah dia itu dinyatakan enggak bersalah? Sulit sekali ini, di dalam hal ini, lah ini.

Jadi ketika harga yang kehendaki Pemerintah dalam hal ini sesuai dengan Inpres Nomor 5 tahun 2015 segitu, ketika Bulog enggak mengambil kan juga bukan tidak berprestasi. Tapi memang begitu. Kemudian juga ketika pelepasan atau pengeluaran. *Output* dari ini kan banyak kendala-kendala Pak. Salah satu, kalau kita mengacu fungsi dari Bulog itu adalah bahwa kalau harga tinggi, diadakan operasi pasar. Harga tinggi karena kekurangan barang tetapi kayanya ini harga tinggi bukan karena kekurangan barang Pak. Karena masyarakat membeli mutu yang lebih baik.

Oleh karena itu target yang dilempar oleh Bulog 15 ribu ton per bulan walaupun harganya lebih rendah, ya enggak akan terserap. Hanya terserap 5 sampai 6 kalau enggak salah, mohon maaf kalau keliru ini. Ini artinya apa? Artinya sebenarnya Bulog sudah melaksanakan fungsi-fungsinya tetapi diributkan dengan turunan dari fungsi-fungsinya ini yang akhirnya menjadi terbelit-belit seperti ini.

Yang terakhir Pak, karena waktunya 3 menit. Tentang stok beras. Pertanyaannya, memang menjadi stok beras itu sulit sekali Pak karena mudah rusak dan sebagainya, perlu gudang dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah stok beras itu harus berbentuk barang yang tersimpan? Karena saat sekarang ini, komunikasi juga lebih mudah, hubungan antar negara juga lebih mudah, kemudian *e-mail* juga sudah. Jadi teknologi informasi, teknologi *aggrement* dan sebagainya itu sudah begitu tinggi Pak. Bagaimana kalau tidak berbentuk beras kemudian potensi-potensi di mana ketika nanti Bulog membutuhkan untuk operasi pasar itu barang sudah ada. Kalau waktu operasi pasar enggak ada ya itu memang kesalahan Bulog. Di dalam hal ini informasinya secara tetap. Tapi kalau ada, otomatis kan enggak perlu sebetulnya untuk ini.

Ini mohon sebagai tambahan pertanyaan. Apakah perlu bentuk ini? Karena dengan adanya tidak bentuk beras tetapi potensi di mana ketika dibutuhkan ini menjadi gudang mengurangi kerugian yang begitu banyak Pak Ketua. Saya kira itu Pak. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Waalaikumsalam.

Pak H. Sutrisno. Singkat padat Pak, waktunya 3 menit Pak.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Belum apa-apa sudah dibilangi 3 menit.

Terima kasih Pimpinan.

Langsung saja lah. Pak Dirut, para pejabat yang mendampingi. Menyikapi pemaparan Bapak, menurut hemat saya, solusi utamanya ada pada status kelembagaan Pak. Jadi dulu Bulog itu kan Lembaga non departemen, wajar manakala semuanya di biayai oleh negara. Nah sekarang Bapak itu punya 2 fungsi ya. Fungsi sebagai agen pembangunan, mengendalikan harga, menyediakan cadangan pangan. Yang kedua adalah fungsi profesional sebagai perusahaan. Sama seperti perbankan, begitu.

Nah, sebagai agen Pemerintah menyediakan cadangan beras, stabilitas harga, Pak ketua. Memang seharusnya dibiayai sepenuhnya oleh negara. Tidak menggunakan dana pinjaman komersial, begitu ya. Jadi usulan Bapak, saya mendorong untuk memang diperjuangkan Komisi IV khusus untuk itu ya harus siapkan keuangan. tapi tentunya untuk menjalankan fungsi perusahaan ya Bulog sekarang harus bersifat profesional, begitu.

Pak Dirut, petani kita sudah pintar sebenarnya ya. Yang belum pintar itu adalah membuat jaringan pasar, ini yang menjadi persoalan kenapa nilai

tambah petani menjadi kecil. Saya sangat berharap peran Bulog ini. Pada saat panen Bulog mengakses semua produk petani termasuk beras. Dan saya kira manakala *over* produksi, saatnya Bulog ekspor. Pada saat kekurangan produksi enggak apa-apa impor tapi kan duitnya bisa ditutupi ekspor itu, saya berharap seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan Badan Pangan akan dibentuk, itu kan khusus untuk menangani kepentingan negara. Tapi bagaimana kepentingan petani, kepentingan masyarakat pasti ada Lembaga yang proporsional untuk bisa mengatur itu. Baru petaninya akan sejahtera.

Kemudian yang kedua, yang kedua Pak Dirut. Saya ingin ada jawaban. Ini bagaimana sih manajemen pengelolaan beras Pemerintah. Kok sampai-sampai ada beras impor yang sudah setahun tidak tersalurkan. Dalam teorinya kan ada. Apakah kita pakai sistem LIFO apakah sistem FIFO? Maksudnya pada saat musim panen, itu bisa dikeluarkan. Apa memang ada hambatan peraturan perundang-undangannya untuk tidak bisa mengeluarkan itu? Supaya stok pangan itu selalu baru, begitu. Di sisi lain juga untuk mengurangi beban biaya. Ini mohon untuk diperhatikan.

Yang ketiga. Tadi Pak Dirut mengatakan ada rugi 955 miliar. Mohon dijelaskan, apa faktor penyebab kerugian itu? Apakah beban belanja pegawai nya sangat tinggi? Apa ada faktor-faktor lainnya?.

Yang keempat. Saya orang Jawa Barat Pak Dirut. Dari dulunya Jawa Barat itu Gudang pangan, Gudang beras. Saya di halaman berapa ini kok cadangan persediaan beras di Jawa Barat dibandingkan Jawa Timur. Jawa Barat setengah Jawa Timur 317 ribu dibanding 631 ribu. Padahal jumlah penduduk Jawa Barat di atas penduduk Malaysia. kemudian Jawa Barat penyangga ibukota. Jawa Barat sangat tepat mengambil kebijakan manakala ada hal-hal yang darurat dalam rangka pengendalian harga. Sangat mudah untuk mendistribusikannya. Apa yang menjadi alasan kok sampai terjadi seperti itu?

Jadi mohon untuk diperhatikan karena Jawa Barat ini dikenal gudang gabah, Jawa Barat penduduk terbesar dan penyangga Ibukota. Terima kasih. Cukup 3 menit.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E):

Selanjutnya Mbak Luluk.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan juga Pak Dirut dan semua jajarannya

Yang pertama. Saya membaca dari rilis media beberapa waktu yang lalu. Pak Buwas mengatakan bahwa mafia soal penyaluran beras ini. Nah yang kita mau dengar sebenarnya kelanjutan dari itu bagaimana ya Pak ya? Jadi langkah-langkah yang sudah dilakukan, kemudian pada tahapan pencegahannya kaya bagaimana dan yang dianggap mafia itu sebenarnya siapa begitu? Karena kalau hanya mengira-ngira kan enggak seru juga ya. Kita mau dan punya hak lah publik itu mendapatkan *update* bahwa ini ada hal yang sangat serius karena kalau enggak pasti Bulog juga yang akan dipersalahkan oleh publik karena dianggap juga sebagian dari mafia itu. Sementara juga di posisi ini juga Pak Buwas yang menyatakan bahwa ada

mafia yang bekerja. Cara kerja mafia nya itu seperti apa sehingga kemudian sampai pada kesimpulan seperti itu.

Kemudian yang kedua terkait dengan carut marutnya BPNT dan kemudian kesulitan distribusi penyerapan gabah, beras dan lain-lain. Mungkin tidak kemudian Bulog melakukan semacam upaya untuk menghidupkan kerja sama melalui koperasi atau Bumdes begitu. Karena ternyata temuan di bawah misalnya ini tadi saya juga coba kontak dengan teman-teman di Dapil misalnya. Ternyata yang namanya e-warung ini banyak juga dikuasai oleh oknum-oknum perangkat desa. Tapi itu beda ceritanya kalau misalnya itu menggunakan model pemberdayaan Bumdesnya yang kemudian ditunjuk sebagai e-warung itu begitu. Atau kemudian koperasi yang ada di tingkat desa. Jadi akhirnya di banyak desa itu yang ada ya para perangkat desa yang mengambil manfaat itu atau orang-orangnya para Timses kepala desa ini kan seperti itu yang terjadi.

Kemudian ada juga pertanyaan ini Pak Buwas, ini titipan dari netizen karena memang saya coba komunikasi, saya *repost* kalau mau rapat. Banyak pertanyaan mereka antara lain: ini Bulog itu kan identik dengan pergudangan. Ini sebenarnya gudang Bulog itu ada di mana sih? Karena gudang Bulog pertama tidak diketahui keberadaannya. Jadi yang di khawatirkan gudang ini fiktif atau jumlahnya enggak sesuai dengan yang dilaporkan atau sebenarnya gudang itu memang tidak dimiliki Bulog. Artinya Bulog itu bisa sewa atau pinjam, nah ini kalau misalnya sewa itu seperti apa karena nanti itu kan juga terkait dengan anggaran yang dikeluarkan. Ini sewa rugi atau sewa untung?

Kemudian yang keempat yang terkait dengan tata kelola soal beras ya karena dilihat dari fungsinya ini kan ternyata banyak. Tetapi dari sisi kelembagaan ini *power* nya ini tidak dikasih yang *super power* begitu. Mengapa kemudian Badan Pangan itu menjadi keniscayaan yang itu harus sebenarnya itu di realisasikan? Syukur kalau bisa tahun ini tapi kalau tidak paling lambat ya sekian bulan yang akan datang karena tempo hari pada waktu rapat bersama dengan Kementan kita juga, kami maksudnya semuanya mendorong maksimal 3 bulan lah kajian tentang bagaimana kelembagaan Badan Pangan itu bisa ketemu bentuknya tapi bukan mengkaji perlu dan tidaknya karena itu sudah amanat Undang-undang.

Nah saya pernah kesempatan, sebentar lagi Pak Ketua. Jalan-jalan ke Maroko, negeri yang tidak sekaya Indonesia. Kita semua tahu lah kondisinya seperti apa, tetapi mereka bisa cerita bagaimana Maroko yang negara yang tidak sekeren kita punya dengan kondisi 4 musim. Panas, dingin, dan musim saljunya tetapi tata kelola dan soal manajemen gudangnya luar biasa. Bulognya lah kalau kita di sini. Sehingga tidak berdampak pada harga di tingkatan petaninya juga di tingkatan konsumennya. Musim apa pun itu tidak menimbulkan gejolak terkait dengan harga karena negara hadir, karena negara juga memberikan subsidi pada harga. Jadi petani, pupuk itu mungkin enggak perlu sama mereka, tetapi harga itu penting. Jadi petaninya tetap sejahtera dan kemudian di tingkatan konsumen itu juga bisa terjangkau.

Karena seperti tadi disampaikan bahwa petani kan enggak punya gudang sendiri. Begitu dia misalnya panen dia akan juga lepaskan. Jangan sampai kemudian petani enggak mampu beli beras yang dia konsumsi sehari-hari. Karena harga tingkatan di pasar dan kemudian apa yang dia jual, hasil gabahnya atau padinya itu sudah enggak ketemu lagi. Nah ini, ini seperti apa kalau mekanisme di Bulog.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Mbak Luluk, cukup.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Cukup Bapak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Jadi Mbak Luluk menjelaskan.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Untuk disertasi.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Mungkin netizenanya Mbak Luluk belum kenal Mbah Google. Gudang Bulog itu setiap kabupaten ada. Tapi namanya sebagai masih ada yang lebih dikenal nama gudang Dolog ya. Jadi setiap kabupaten pasti ada. Jadi kalau Mbak Luluk mau melihat gudang setiap kabupaten ya silakan nanti. Sama Pak Direktur saja jangan Pak Dirut.

Bu Endang, silakan.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWAI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

**Pak Ketua dan para anggota dewan yang tercinta,
Dan Pak Buwas khususnya dengan jajarannya.**

Jadi tadi sudah dibahas oleh beberapa teman tentang *agent of development*. Nah menurut saya Pak ada sesuatu yang harus kita kritisi bersama bahwa memang mazhab perekonomian kita yang arahnya terlalu liberal sehingga Bulog ini menjadi korban sebetulnya. Nah jadi kalau Pak Ketua setuju mari kita rapatkan barisan untuk mendudukkan Bulog seperti pada awal Pak Soeharto, *Nuwun sewu* ini. Saya bukannya, warisan orde baru itu tidak semuanya salah jadi ada yang perlu kita teladani bersama.

Nah kemudian tadi Pak, kita sudah sekarang ini meningkat ke era digitalisasi, era ke industri 4.0. Nah mestinya Pak, di sini saya melihat bahwa aposisi Perum Bulog ini selalu hanya menjadi operator. Nah mungkin melalui Menko Perekonomian dan juga Komisi IV dan Komisi yang lain. Bagaimana Bulog ini bisa menjadi regulator yang tadi disampaikan oleh teman-teman juga karena saat ini ada *problem stunting* Pak. Ini adalah kesempatan emas bagi Bapak.

Jadi saya *appreciate* Bapak sudah membuat minuman, ini hanya untuk *stuntingnya* Bapak-bapak kalau kopi. Nah bagaimana Bapak bisa

menciptakan menu makanan yang praktis untuk mengatasi *problem stunting*. Bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat, kemudian juga Kementerian Perindustrian. Karena banyak sekali Pak, peneliti-peneliti kita yang sudah menghasilkan itu. Tapi tadi Pak, tidak ada yang bisa mensosialisasikan. Di lain pihak di Dapil, hampir semua Dapil Pak, *problem* Ibu-ibu apalagi dengan adanya *smartphone* ini Pak. Semuanya terbius dengan ini Pak.

Jadi mohon Pak Buwas bisa bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian dan perguruan tinggi di Indonesia khususnya dengan teknologi pertanian. Banyak sekali sebetulnya yang bisa kita kerjakan yang bisa tadi, mengatasi *stunting* dan juga menyejahterakan petani setempat Pak. Nah kemudian integrasi dari Bulog dengan pusat-pusat peternakan Pak. Ini belum terjalin. Jadi sementara ini kan Bulog hanya beras saja yang dipikirkan. Padahal ada kedelai dan jagung. Apa lagi jagung ini makanan pokoknya ternak terabaikan Pak. Jadi selalu impor dari Thailand padahal kita ini juga penghasil jagung.

Nah tadi yang dikatakan Bu Luluk, Gudang-gudang Bulog ini banyak sebetulnya Pak. Tapi tadi tidak dimanfaatkan dengan baik dan tata kelolanya juga belum seperti yang diharapkan oleh kita semua. Nah untuk itu Pak, revitalisasi manajemen juga perlu Pak. Karena banyak sekali teman-teman saya yang bergerak di sektor peternakan itu mengalami kekurangan makanan ternak. Di lain pihak, hasil dari ikutan beras dan juga jagung itu bisa dijadikan makanan ternak. Karena tujuan kita kan kesejahteraan peternak dan petani kita yang makin terpuruk kehidupannya.

Nah ini perlu ada inovasi-inovasi khusus yang sebetulnya sudah banyak dilakukan oleh teman-teman kita di perguruan tinggi dan Lembaga-lembaga penelitian yang tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Cukup Bu Endang.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWAI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Cukup Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Jadi Bu Endang, saya hanya menjelaskan sedikit. Menurut data dari Kementerian Pertanian kita surplus beras dan surplus jagung. Ini kata nya, ya. Silakan Ibu Nuraeni.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

**Ketua yang saya hormati,
Direktur Bulog beserta jajarannya.**

Pertama, tentu saya setuju dengan teman-teman terdahulu bahwa memang Perum Bulog ini harus dikembalikan dari sisi peran fungsi serta penugasan yang dulu agar lebih optimal lagi dalam rangka pendistribusian pelaksanaan penyaluran beras kepada masyarakat, itu yang pertama. Akan tetapi tentu peran dan fungsi ini juga kalau seandainya Perum Bulog ini kita tetapkan sebagai Badan Pangan Nasional tentu kan tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada sinergitas dan koordinasi yang kuat dengan Kementerian yang lainnya seperti Kementerian Sosial, Keuangan, karena itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi jangan sampai Perum Bulog juga dijadikan bulan-bulanan dalam rangka pelaksanaan di bawah ada sesuatu atau hal yang tidak diinginkan pasti Perum Bulog yang dijadikan, dilempar handuk begitu ya Pak. Ini jangan sampai terjadi.

Berikutnya saya melihat bahwa sebaran pengadaan beras dalam negeri ini 1,134 juta ton ini di peta yang disampaikan. Ini provinsi Banten ini tidak terlihat, di situ masih menyatu ya Banten dengan DKI. Saya minta penjelasan mengapa seperti itu? Karena mengingat provinsi Banten dengan penduduk yang cukup besar ya 11 juta kurang lebih dan merupakan juga lumbung padi di Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, Kabupaten Tangerang juga masih banyak lumbung padi kita. Akan tetapi masih saja menyatu dengan DKI. Mohon kiranya nanti ke depan ini untuk dipisahkan karena ini kaitan dengan pendistribusian juga kita masih menyatu dengan DKI, sementara jumlah penduduk DKI juga sangat besar. Ini yang menjadi keributan di provinsi kami. Berapa pun yang dikeluarkan ya, Pemerintah padahal bagus kan memberikan Raskin dan lain sebagainya. Akan tetapi karena memang tadi kita masih menyatu antara DKI dan provinsi Banten, ini juga menjadi kendala utama di kami.

Di samping itu saya melihat bahwa dari sekian 1 juta koma 1 ton ini, yang ingin saya tanyakan, apakah memang beras tersebut didapatkan dari petani langsung atau dari tengkulak? Karena mengingat ini petani ini kita selalu saja terjerat oleh tengkulak, belum panen mereka sudah melakukan pembelian di saat masih hijau-hijau. Sehingga tetap saja petani kita mengalami kerugian yang cukup besar.

Di samping itu saya juga ingin bahwa kaitan dengan persoalan yang Bulog sampaikan, anggaran katanya yang sangat membutuhkan anggaran yang besar kaitan dengan operasional ya, operasional dengan pinjaman kredit perbankan ini sangat miris sekali. Nah tentu ini harus ada mekanisme yang jelas. Komitmen dari Bulog serta konsistensi terhadap panen yang akan, *timing* panen yang akan nanti dilihat. Karena jangan sampai pada di saat panen besar-besaran, Bulog juga ini sepertinya menyetok beras ya terus mengeluarkannya dengan yang cukup murah. Ini juga jadi persoalan yang cukup besar. Serta mengevaluasi terhadap Inpres Nomor 5 terhadap harga beras ya, harga pembeli Pemerintah ini, beras Pemerintah agar memang untuk segera ditingkatkan keberpihakannya kepada petani kita. Mungkin itu Pak. Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Cukup.

Jadi yang 1,1 itu stok dari 2018 dari impor ya. Selanjutnya Pak Muhtarom.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

**Yang terhormat Pimpinan Komisi IV dan Pak Dirut Bulog dan jajaran,
Anggota Komisi IV yang saya hormati.**

Langsung saja Bapak. Jadi memang kalau saya melihat, ini Bulog mendapatkan tantangan yang luar biasa. Ekspektasi masyarakat itu seolah-olah semuanya digantungkan pada Bulog padahal sesuai regulasi yang ada. Bulog adalah ya sesuai dengan aturan yang ada. Artinya itu sebagai BUMN yang berorientasi profit kemudian juga harus melaksanakan peran-peran sosial. Ini sesuatu yang kontradiktif jadi dalam pelaksanaannya juga tidak semudah apa yang diharapkan oleh masyarakat kita kaitannya dengan stabilisator, kemudian stok beras dan lain sebagainya.

Maka ini kalau di Bulog terjadi seperti ini saya pikir merupakan dampak dari ego sektoral atau lemahnya koordinasi lintas Kementerian. Akhirnya berdampak seperti ini. Ya memang ujung-ujungnya karena Bulog sudah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang pada akhirnya meskipun punya hutang sekian triliun kemudian setiap hari Pak Buwas harus berpikir jasa 9 miliar, kemudian operasional 6 miliar. Tapi pada ujung-ujungnya ya karena sudah melaksanakan tugas yang sesuai dengan regulasi yang ada ya kembali kepada Pemerintah lagi. Dan pada akhirnya juga masyarakat lagi. Maka yang seperti ini harus dibutuhkan sebuah terobosan sistem manajemen yang benar-benar bagus terkait dengan fungsi stabilisator dan penyediaan stok.

Dan memang kemarin seperti apa yang saya sampaikan ego sektoral yang terjadi di lapangan. Di satu sisi HPP itu rendah kemudian harga pasar lebih tinggi maka ini dari Kementerian Pertanian memaksa Bulog harus membeli beras. Tapi di sisi lain Bulog juga cerdas. Lebih baik saya memberikan DP kepada masyarakat, ya *tak* beli tapi akhirnya kehilangan DP daripada harus rugi ratusan juta. Ini kondisi di lapangan Pak. Ini waktu saya masih aktif.

Jadi satu sisi Kementerian Pertanian lewat Direktur Tanaman Pangan ini memaksa petani untuk membeli, di lain pihak Bulog yang harus membeli. Padahal di kita mengerti bahwa keuangan Bulog juga terbatas. Akhirnya Bulog juga tidak kalah cerdas Pak. Yang penting masyarakat yang ditekan untuk menjual ini di DP oleh Bulog pada akhirnya juga tidak jadi dibeli. Karena daripada ratusan juta harus rugi akhirnya adu kecerdasan lah seperti itu yang terjadi di lapangan.

Kemudian memang Bapak harus turun ya selalu ada lah yang oknum-oknum di jajaran Bulog ini yang berkonspirasi dengan pihak agen-agen atau pihak kelompok-kelompok tani yang mempunyai kewenangan pasok ke Bulog. Itu ada yang harus dibersihkan Pak. Ini sudah tidak rahasia umum lah begitu, siapa yang bisa memasukkan beras ke Bulog itu dan siapa yang susah masukan beras ke Bulog itu olah oknum yang harus disikapi.

Jadi kita yang ada di lapangan tahu lah Pak jadi kalau di *codos* itu yang keluar bagus. Tapi sebenarnya di waktu memasukkan sudah dipasang paralon besar jadi yang tengah itu enggak jelas tapi yang pinggir itu jelas.

Jadi itu modus, mohon maaf Pak, agak-agak teknis sedikit. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih.

Dulu beliau ini Bupati Pak. Jadi pengalamannya banyak termasuk tipu-tipu di lapangan paham. Selanjutnya Pak Slamet. Silakan Pak Slamet.

F-PKS (drh. SLAMET):

Baik terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

**Pimpinan, rekan-rekan anggota Komisi IV yang saya hormati,
Pak Buwas selaku Pimpinan dan juga seluruh Bulog termasuk Pak Gatot,
Saya ucapkan selamat menempati tugas baru.**

Ada beberapa saja yang ingin kita sampaikan, yang ingin saya sampaikan. Pertama, sama dengan rekan-rekan yang lain terkait dengan Badan Pangan dan juga, artinya begini tampaknya perlu langkah yang paralel ketika kemudian Komisi IV harus memberikan dorongan supaya Badan Pangan itu nantinya bisa Bulog menjadi salah satu menjadi alih fungsi menjadi badan itu. Tampaknya tidak terlalu salah kalau kemudian Bulog juga secara proaktif membuat kajian tersendiri bahwa memang saya layak ditunjuk menjadi Badan Pangan sesuai dengan Undang-undang Pangan. Saya pikir ini dilakukan sehingga paralel antara kita legislatif mendorong Pemerintah untuk itu, di sisi lain memang Bulog sudah menyiapkan dirinya dari sisi konsep dan lain-lainnya. Ini saya pikir untuk dilakukan, itu yang pertama.

Yang kedua terkait dengan memang peran Bulog ada penugasan di saat yang lain juga harus dalam posisi mencari untung atau *profit oriented*. Oleh karenanya saya pikir Bulog juga harus proaktif lagi mencoba melakukan kajian terkait dengan subsidi harga yang ada di petani. Maksud saya seperti ini Pak. Ketika kemudian Kementerian Pertanian mempunyai program subsidi baik subsidi bibit, subsidi pupuk. Nilainya kira-kira 32 triliun, yang itu tidak akan memberikan semangat dan dampak kepada petani untuk kemudian bertani. Karena memang ketika kemudian dia panen, harganya di bawah HPB. Padahal nilai 32 triliun itu berulang kali kalau kemudian dialihkan menjadi subsidi panen bagi para petani, saya pikir ini nilainya akan bahkan lebih efisien dan menguntungkan bagi petani sehingga proaktif dari Bulog untuk kemudian melakukan kajian bahwa subsidi harga ini lebih menguntungkan, lebih membanggakan petani.

Petani akan siap bertani karena dijamin ada subsidi harga, dia tidak akan rugi. Dia akan diberikan keuntungan di atas HPP misalnya 1000.

Sehingga ketika harga turun, Pemerintah tanggung jawab melalui Bulog nya, di saat yang sama petani kita juga bisa melakukan. Ini dua hal yang saya pikir Bulog untuk proaktif untuk melakukan itu sehingga ini di dengar oleh Pemerintah.

Yang berikutnya saya hanya ingin memastikan saja langkah-langkah apa yang dulu sudah pernah disampaikan mau ada pemusnahan stok yang sedemikian rupa yang waktu di Komisi VI juga disampaikan mau ada dibuat etanol dan lain-lain. Nah ini sudah sejauh mana ini? Kalau dulu di Komisi VI Pak Buwas sempat menyampaikan akan nada perusahaan etanol yang untuk menyerap pemusnahan ya. Mungkin saya ingin mendapatkan gambaran perkembangan dari itu. Itu saja Pimpinan mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Selanjutnya Mbak Riezky, silakan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Dirut, Pimpinan.

Saya ini sebenarnya anak baru. Jadi dari tadi saya mendengar senior di sini berkata untuk berpikir *out of the box*. Dari tadi saya mencoba bermain dengan pikiran saya sendiri, ini saya mau diskusi ya Pak ya? Tadi ada juga kang Ono sempat ngomong untuk kita sepakat untuk mendorong Bulog untuk menjadi pemain tunggal. Tetapi tadi juga ada yang saya pahami ada *profit oriented* untuk Bulog. Saya melihat dari paparan Bapak beserta jajaran ini bahwa Bapak tidak tabu dengan adanya teknologi dan sistem pasar hari ini. Terbukti dengan ini ya.

Apakah mungkin, apakah mungkin kita sedikit ini, ini usulan saya untuk semua melakukan, Bulog mencoba berdiskusi dengan misalkan Komisi yang berkaitan dengan perdagangan untuk melakukan diskresi Undang-undang karena melihat hari ini banyaknya retail ya, retail yang ada di setiap daerah. Bahkan pelosok pun sudah banyak ya. Di desa itu pasar tradisional itu digerus oleh retail ya. Apa mungkin, saya melihat dari *packaging* Bapak enggak malu-malu in kok Pak. Keren malah. Akan tetapi mungkin enggak ini diterobos untuk masuk ke sana bahwa retail ini wajib membeli. Ini harapan saya, jadi petani menerima begitu loh maksud saya juga. Enggak pusing juga begitu.

Nah terus kaya begini. Ini kan kenapa enggak Pak? Saya lihat di sini ada Shopee, ada apa lah, bentar lagi Tokopedia, ya kan? Begitu mungkin. Nah karena begini, saya tidak mau membebani dengan permasalahan. Mari kita cari solusi karena Bulog tidak boleh tabu dengan siklus mata rantai distribusi. Nah ini yang penting juga Pak. Kita enggak boleh tabu. Era nya begini, mazhab nya begini, suka enggak suka kita ikutan begitu loh. Nah saya berharap juga ada bagian, saya enggak tahu di Bulog ada Litbang nya

enggak dalam tanda kutip coba membuat *grand design*. Sosial jalan, profit jalan, jadi ini bisa *cross*, kan begitu. Harapan saya ke depannya Bapak enggak pusing lagi. Saya bantu Bapak supaya enggak pusing ini Pak sebenarnya, begitu. Cukup Pak Ketua Komisi saja yang pusing karena sendirian di situ.

Jadi saya harap Pak, dan rekan-rekan Komisi IV *let's find the solution*. Ada satu judul buku bagus Pak, judulnya *Blue Ocean Strategy* Pak. Silakan dicari. Itu bagaimana membuat diferensiasi. Nah saya harap Bulog ke depan modern, tidak tabu akan liberalisme tadi yang mau tidak mau suka tidak suka kita hadapi masalahnya begitu loh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Cukup Mbak Kiki.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Itu saja, terima kasih Bapak. Sudah disuruh berhenti masalahnya.

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Jadi jangan ngomong suruh baca buku tapi enggak dikasih. Besok Pak Dirut saya bawakan bukunya. Itu solusi, kalau hanya ngomong suruh beli ya enggak usah disuruh juga bisa.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Sudah enggak produksi lagi Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Selanjutnya Pak Asi Lema, silakan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

**Selamat siang buat Pak Buwas dan jajarannya,
Dan juga rekan-rekan sekalian.**

Pak Buwas, Pak Buwas itu saya kenal sebagai salah satu orang Indonesia pemberani. Pemberani Pak. Ketika Bapak menjadi Dirut Bulog saya itu punya ekspektasi tinggi. Pertanyaan saya Pak. Ini akar persoalannya mendasar menurut saya. Kita itu sebagai negara susah ekspor itu karena produktivitas kita dan kualitas kita lemah atukah karena mafia impor Pak? Ini harus dijawab karena percuma kita ngomong Panjang lebar bicara mengenai

penguatan kelembagaan, kewenangan yang diperkuat, bicara mengenai Bulog menjadi pemain tunggal tetapi kalau akar persoalannya tidak dibereskan, ini namanya omong kosong Pak. Saya ingin tahu Pak.

Beberapa waktu lalu sebelum saya duduk di Komisi IV jadi DPR Pak, saya sering membaca, mungkin juga saya tidak paham Pak soal adanya mafia di bidang Bulog ini dan Pak Buwas mau berhadapan dengan mafia-mafia ini. Saya ingin tahu Pak, langkah sistematis apa yang sudah dilakukan oleh Bapak untuk membereskan dari aspek pencegahan dan juga pun efek jera Pak dan progres nya kira-kira seperti apa Pak? Saya ingin tahu.

Yang kedua Pak, yang juga menurut saya hal mendasar itu adalah tadi sudah disinggung oleh teman-teman, soal sinkronisasi data Pak. Data yang akurat dan valid ini akan melahirkan, menghasilkan sebuah kebijakan yang memang tepat. Saya melihat sebuah instansi Kementerian di sini, mohon maaf Pak datanya itu beda-beda Pak. Sementara Presiden Jokowi kemarin melalui Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 itu sudah jelas ngomong mengenai pentingnya kesatuan data Pak. Nah kalau data kita berbeda-beda. Nanti ada Kementerian yang ngomong kita harus impor. Ada yang bilang "enggak, kita sudah *over* ini, sudah surplus" nah karena itu Pak ini data ini harus sinkron sehingga kebijakan yang kita ambil juga tepat sasaran akurat. Nah ini data ini jangan sampai ada mafia juga Pak ya.

Ini mohon maaf Pak ya saya butuh hal ini *put all things on the table* supaya kita bisa transparan dan terbuka Pak. Mohon maaf Pak, dipahami, saya anggota baru, saya ingin tahun soal 2 hal ini. Sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih.

Terakhir Mbak Wulan. Tadi Pak Krisantus sudah datang tapi lagi ke atas.

F-NASDEM (Hj. SRI WULAN, S.E.):

Terima kasih Pimpinan.

Mitra dan juga rekan-rekan yang saya hormati.

Langsung saja. Karena baru saya tadi juga ada yang harus ditemui jadi atau mungkin saya yang belum dengar begitu kan. Tadi di dalam pemaparan Pak Buwas, ada rencana untuk tahun kegiatan 2020 ya kan. Ada rencana *plan* besar untuk infrastruktur pembangunan *modern rice milling plant*, betul ya? Nah pertanyaannya uang dari mana ini semuanya? Apakah sudah ada pengkajian yang lebih khusus untuk anggaran ini? Karena jangan sampai nanti yang sudah-sudah begitu kan nanti langsung usul defisit kurang dana, kurang apa. Itu yang kita tidak mau karena pastinya rencana ini adalah rencana yang mungkin sangat membanggakan untuk kita semuanya untuk mendapatkan kualitas dari produk yang terbaik. Itu yang pertama.

Terus yang kedua, tadi kalau enggak salah dengar juga. Saya mendengar ada pinjaman dari perbankan sekitar 20 T, betul? Yang akad? Pengajuan, iya pengajuan. Apakah ini sudah ada pengkajian khusus untuk apa nanti penggunaannya? Karena kita tahu bahwa kalau pinjaman dari

perbankan ini pastinya kan ada bunga juga yang harus dibebankan. Nah itu, oh dari APBN? Nah oke permintaan yang saya maksud nanti kalau misalnya itu harus jelas juga kan? Permintaan itu nanti untuk apa? Karena jangan sampai juga kita ini jadi Pemerintah jadi beban terus. Jadi diminta terus, diminta terus karena kan bukan dari Bapak saja yang minta, dari yang lain juga iya. Nah seperti itu. Jadi jangan sampai nanti permintaan ini di oke kan tetapi hasilnya tidak optimal begitu.

Yang ketiga, titipan dari Dapil Pak. Jadi kemarin sebelum saya masuk memang saya kan sudah dikasih tahu bahwa akan ada rapat dengan Bulog begitu kan. Karena beberapa hal yang memang terjadi yang selama ini terus menerus adalah untuk sistem pendataan. Pendataan untuk pendapatan beras. Nah itu kayanya permasalahan dari tahun ke tahun yang belum terselesaikan. Jadi saya harap juga, saya tunggu juga langkah dari Pak Buwas dan rekan-rekan ini supaya ini menjadi langkah yang bagus bahwa untuk penyampaian itu tepat sasaran dan tepat waktu. Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Cukup. Demikian tanggapan yang disampaikan oleh anggota Komisi IV. Selanjutnya saya persilakan Dirut Perum Bulog untuk menyampaikan jawabannya secara singkat dan jelas. Kalau yang orangnya tidak ada, tidak perlu dijawab. Terima kasih.

DIRUT PERUM BULOG (Komjen. Pol. (Purn.) Drs. BUDI WASESO):

Terima kasih Pak Ketua. Ini akan saya jawab secara keseluruhan nanti secara lengkap akan dilengkapi oleh Direksi-direksi kami Pak.

Mohon izin untuk yang pertama, persiapan kita menghadapi kita menjadi salah satu lumbung pangan dunia. Memang kami bekerja sama dengan Menteri Pertanian Pak untuk ini. Dan tentu saja Pak kami ini melihat datanya dari BPS. Memang hanya satu yang pedomani yang pada akhirnya adalah data BPS. Jadi kita berangkatnya selalu dari data BPS. Oleh sebab itu kenapa kami tidak impor, kami bertahan. Memang faktanya dari data BPS kita tidak perlu impor. Dan terbukti sampai hari ini kita tidak perlu impor.

Mengenai dana pinjaman Pak, ini memang kita ke depan berharap Pak. Jadi sesuai dengan kami sudah melaporkan pada saat itu ke Bapak Presiden tentang permasalahan-permasalahan di Bulog. Yang krusial sekali adalah memang menyangkut pendanaan. Pendanaan dari penugasan Pemerintah baik yang lalu mengenai impor beras, ini pendanaannya memang pendanaan komersial karena kami meminjam dari bank dengan bunga komersial.

Sedangkan fakta perkembangannya, beras yang pernah kami impor itu atau Bulog itu merupakan CBP dan itu ditegaskan oleh Peraturan Menteri Perdagangan sehingga kami tidak bisa mengeluarkan beras yang dinyatakan CBP itu untuk kegiatan-kegiatan di luar daripada penugasan, ini memang masalah. Sedangkan penugasan kami, tadi sifatnya ad hoc. Bilamana perintah penugasan baru kami bisa menyalurkan, kalau tidak? Tidak.

Nah ini kami sudah terlanjur pada saat itu dengan perintah yang disampaikan berdasarkan Rakortas. Karena Bulog pada saat itu harus menyiapkan beras 3 juta ton untuk cadangan CBP. Kami karena ini perintah

untuk kepentingan negara seperti tadi yang saya sampaikan, kami betul-betul mengadakan beras sampai 3,1 juta ton pada saat menjelang Pemilu. Nah program kami dulu ada Rastra, Raskin, sehingga sudah pasti keluarnya Pak. Ini ternyata program itu berubah menjadi BPNT mulai 1 September ini di mana secara aturan ketentuan bahwa beras BPNT itu tidak harus dari Bulog. Nah ini yang menghambat dari beras yang ada di Bulog untuk disalurkan.

Sedangkan Menteri Sosial pada saat itu sudah menyatakan bahwa program BPNT itu menggunakan beras Bulog. Itu sudah sesuai dengan perintah Pak Presiden pada saat Rapat lengkap pada saat itu, kami pun hadir. Namun pada kenyataannya di lapangan memang tidak mudah. Karena sudah terjadi tadi kebiasaan yang memang sudah ada penyalur-penyualur yang sudah biasa menyalurkan dan sudah biasa berkolaborasi untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan BPNT. Ini terbukti Pak, Bapak Ibu sekalian terbukti dikala kami kesulitan menyalurkan ada apa, karena kenapa kok perintahnya Pak Menteri Sosial tidak bisa berjalan.

Kami bekerja sama dengan Satgas Pangan dengan kami juga membuat Satgas-satgas pemantauan di lapangan. Kami menemukan pelanggaran-pelanggaran itu. Sejauh mana pelanggaran itu ditindaklanjuti karena kami tidak punya kewenangan untuk menindaklanjuti. Maka kami serahkan ke Satgas Pangan yang ada di Kepolisian untuk penyidikannya. Jadi sekarang sedang berjalan bahkan Satgas Pangan sendiri sekarang sudah mengembangkan. Jadi kejadian yang tadi sebagian dari Bapak Ibu sampaikan, memang benar adanya.

Kalau saya ditanya mafia. Sebenarnya mohon izin Bapak Ibu sekalian. Saya tahu persis, hanya kewenangan saya yang tidak ada, itu saja. Ya ini harus, mohon kami harus menyampaikan ini kepada yang berwenang yaitu di pihak kepolisian melalui Satgas Pangan Pak. Supaya ini ditangani oleh Satgas Pangan dan dia tidak menghilangkan barang bukti, itu yang paling penting. Karena sekarang ini memang mereka masih ingin coba bertahan, lagunya mencoba bertahan. Hanya memang keterbatasan kewenangan kami itu yang mereka masih bisa eksis.

Nah sehingga program kami Pak, untuk BPNT itu kami siapkan beras untuk kegiatan BPNT itu 300 ribu ton mulai dari September sampai Desember nanti. Tapi faktanya itu hanya 6% Pak yang terserap. Bahkan nanti begitu sampai Desember, prediksi kami hanya 160 ribu ton dari 700 ribu ton yang kami persiapkan. Karena tadi Pak, jadi *supply* nya memang bukan dari kita.

Kalau kita bekerja sama dengan pihak ketiga untuk *supply* itu pasti sampainya ke e-warung itu berubah, ini berubah. Itu sebabnya kami kenapa kami berkeras, biarkanlah dari Bulog. Karena kami juga akan membersihkan oknum di dalam Bulog Pak. Karena kalau begitu kami tunggal, nanti bisa meyakinkan di mana kesalahannya. Kalau hari ini, kami enggak bisa menunjukkan kesalahannya siapa ini yang berbuat ini, abu-abu Pak. Karena ada kolaborasi tadi, pelanggaran-pelanggaran di lapangan.

Nah ini yang memang harus saya sudah sampaikan bahwa ini harus kita selesaikan. Karena jujur saja Pak, kami juga menyadari yang tadi ASN kenapa tidak bisa, TNI-Polri. Kami juga pernah mengalami, dikala kami tugas di Polri, kami mendapatkan beras dari Bulog, jatah. Jangankan dimakan, di jual saja enggak laku Pak. Dimakan enggak bisa, mungkin hanya untuk ayam. Ini akhirnya pada saat itu keputusannya untuk tidak menggunakan beras Bulog. Nah ini memang tantangan buat kami Pak, karena kami yang

mengalami. Kenapa? Kami sebenarnya sudah tahu Pak, sebab-akibatnya karena adanya tadi, mekanisme dan macam-macam ditambah ada oknum tadi di internal kami yang memanfaatkan ini.

Makanya sampai hari ini pun kami belum bisa menyelesaikan secara tuntas oknum-oknum di dalam tubuhnya Bulog karena tadi Pak, kami tidak punya kewenangan penuh. Maka kami secara bertahap Pak tetap. Bahkan saya sudah mengambil langkah-langkah drastis sampai ada satu desa yang kami *bedol* desa lah, kami ganti semua karena sudah tidak karu-karuan. Tapi memang kalau bilang oknum sudah tercemar, itu susah berubahnya dia bertahan dan berkolaborasi dengan jaringannya. Maka dengan secara macam Pak kami melakukan terobosan-terobosan ini termasuk bagaimana kita mengatasi BPNT itu Pak ke depan dengan kami membuat sistem. Sudah kami lakukan.

Kalau tadi juga ada yang menanyakan “apa yang dilakukan untuk terobosan-terobosan?” banyak sekali Pak. kami yang melakukan terobosan itu. Bahkan kami menjamin kualitas, kualitas dari beras yang ada di Bulog. Kami memang punya, masih punya sisa untuk impor yang lalu, 1,8 juta yang lalu. Kan zamannya saya Dirut Pak, itu masih tersisa kurang lebih 900 ribu ton. Ini bermasalah manakala kita tidak hati-hati merawatnya atau tidak teliti merawatnya. Karena ini sudah pasti akan ada penurunan kualitas.

Di sisi lain Bunga yang terjadi dalam pengadaan itu per hari terus berjalan. Jadi beras ini mau dijual murah enggak mungkin kalau dibebankan dengan tadi, bunga. Tadi ada pertanyaan bagaimana dengan komersial kita? Pak, Bulog ini mau komersial apa juga rugi terus. Nanti kalau mau tanya ini Direksi Keuangan saya yang bisa menjawab secara teknis. Kita komersial itu untung, pasti untung. Persoalannya karena keuntungannya jadi bebannya untuk menutupi dari penugasan tadi, jadi rugi lagi. Jadi Bulog itu maju, mundur, samping kiri kanan tetap kena, kena rugi maksudnya. Karena memang penugasan.

Nah ini memang kita harus ambil langkah apa? Saya sendiri masih mencari-cari yang tepat itu langkahnya apa karena saya pernah melaporkan ini, hal ini kepada Pak Presiden. Sehingga ada tadi Bu, saya mengajukan kepada beliau. Harusnya CBP ini karena ini berasnya Pemerintah, punya negara, maka yang membiayai negara, bukan Bulog. Sekarang ini semua tumpuannya ke Bulog. Dan penugasannya,

F-PKS (drh. SLAMET):

Interupsi Pimpinan. Mau sedikit

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Silakan Pak Slamet.

F-PKS (drh. SLAMET):

Pak Dirut kalau tadi disebut penugasan itu mestinya kan ada uang APBN di sana. Apakah sampai hari ini tidak ada? Dalam bentuk penugasan tidak ada uang Pemerintah di sana? Terima kasih.

DIRUT PERUM BULOG (Komjen. Pol. (Purn.) Drs. BUDI WASESO):

Terima kasih Pak.

Jadi untuk CBP tidak ada Pak, sama sekali. Jadi ini pinjaman 100% pinjaman bank dan kita kenakan Bunga komersial Pak. Maka hari per hari tadi yang saya bilang Pak, bunga kita terus ada beban bunga. Uang pokoknya ya berupa beras yang tidak bisa kita uang kan. Sedangkan keputusannya ini selalu berubah-ubah. Dikala suatu ketika kita boleh menjual beras CBP itu untuk perputaran supaya kualitasnya tetap terjaga. Di sisi lain ada yang sepihak mengatakan tidak boleh. Nah ini kan jadi berhenti lagi.

Harapan kami memang Pak, harapan kami ini bisa disalurkan melalui kegiatan-kegiatan dari program Pemerintah seperti BPNT, ASN, TNI Polri dan kami menjamin kualitas itu Pak, karena kami sudah berupaya dan melakukan terobosan-terobosan, bahkan kami menemukan satu teknologi yang kita dapat menyimpan beras dalam kurun waktu lama tidak ada perubahan sedikit pun. Ini sudah kita coba, sudah kami coba Pak. Kami simpan, begitu kita dengan teknologi itu dalam kurun waktu satu tahun kita buka tidak ada perubahan apa pun.

Nah ini yang sekarang sedang saya gunakan untuk di wilayah-wilayah yang memungkinkan kita menyimpan lama berupa beras. Kalau gabah tidak ada masalah Pak. Di sisi lain Pak, ini juga bermasalah, dikala kami dulu di Bulog mendapat perintah impor beras. Itu pokoknya jumlahnya, yang penting jumlahnya. Umpamanya 1 juta ton ya yang penting 1 juta ton. Kita tidak pernah memperhitungkan beras ini cocok enggak di konsumsi oleh masyarakat Indonesia? Tidak Pak. Kenapa tadi ada 900 ribu Pak? Karena beras ini tidak mudah untuk didistribusikan karena tidak sesuai dengan *taste* nya orang Indonesia pada umumnya. Jadi ini nanti kalau di *mix* Pak seperti itu sebenarnya. Jadi tidak mudah.

Ke depan pengalaman ini, kalau *toh* nanti kita harus impor karena kekurangan. Tapi *insya Allah* tidak Pak, *insya Allah* sampai 2020. Kita harus memilih beras dari negara yang sesuai dengan *taste* nya orang Indonesia. jadi tidak seperti sekarang, yang penting jumlah tapi tidak bisa dikeluarkan. Belum lagi nanti soal harga Pak, tadi, karena kita tidak bisa mengeluarkan karena itu dia dinyatakan CBP harus melalui Rakortas dan penugasan, maka berhenti Pak. Bunganya tidak pernah berhenti, kualitasnya tidak pernah berhenti turun. Nah ini bermasalah, kualitasnya turun harganya naik karena bunga-bunga dan perawatan. Ini memang menjadi titik permasalahan,

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Begitu, sebagai penyangga untuk penyelamatan. Tapi bukan ketergantungan impor itu. Karena ada tugas Bulog yang kedua adalah penyerapan dengan gerakan Sergap itu Pak ya? Jadi di petani kita bagaimana diambil walaupun dengan harga lebih mahal tentunya. Tapi itu pilihan yang terbaik dari yang terburuk Pak. Terima kasih

DIRUT PERUM BULOG (Komjen. Pol. (Purn.) Drs. BUDI WASESO):

Baik Pak, jadi itu lah komitmen kami Pak. Walaupun harga petani lebih mahal. Faktanya kami tetap petani dan kami tidak impor. Sudah 2 tahun ini

kami tidak impor Pak. Jadi kami walaupun harganya lebih mahal Pak di petani daripada kita impor. Kami sudah berkomitmen Pak semua, tidak akan ada impor selama kita masih memproduksi yang cukup. Itu keberdayaan kami kepada petani Pak, produksi dalam negeri.

Namun demikian kawan kami harus juga di dukung Pak. Kenapa Pak? Kalau anggaran kami ini semua pinjam Pak, sedangkan ini menjadi *Waber* stok negara maka kita akan terlilit dengan hutang Pak. Juga kalau hilirnya kan enggak dapat. Kami tidak mendiskusikan ini untuk kepentingan program Pemerintah BPNT Pak. Maka ini akan menumpuk Pak, beras ini. Gudang kita juga terbatas Pak. Kalau di penuh gudang Bulog yang ada Pak itu 3,6 sekian juta ton untuk seluruh Indonesia. Tapi kita tidak bisa menyerap lagi Pak. Itu lah sebabnya kami memperhitungkan di beberapa daerah yang surplus. Yang memproduksi beras, kita kosongkan beberapa Gudang untuk penyerapan untuk menampung sehingga kami selalu serap. Dan target kami tahun 2019 ini adalah 1,8 juta ton seharusnya Pak. Kenapa kami hanya bisa 1,1? Sebenarnya permasalahannya bukan kami enggak mau. Kami ini akan terbebani dengan hutang yang berbahaya kalau kami menyerap dengan jumlah yang sama. Kalau hari ini pun belum ada jaminan untuk pengganti uang itu Pak, karena berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan bahwa yang dijamin oleh negara untuk CBP itu hanya Rp 2,5 triliun. Berarti setara dengan 250 ribu ton beras. Berarti sisanya siapa yang jamin? Pada itu dinyatakan CPB kita tidak bisa jual. Maka saya bilang siapa yang mau beli 1 juta saya kasih hari ini begitu, kalau boleh. Tapi kan enggak boleh Pak, harus melalui Rakortas, harus izin pada negara karena ini CPB.

Nah ini juga masih dilematik jadi permasalahan karena sampai hari ini belum ada keputusan yang pasti siapa sih yang bertanggung jawab? Termasuk tadi bagaimana beras yang harus di disposal. Rupanya tidak mudah mendisposal. Karena mendisposal yang 20 ribu ton ini sudah Menteri Pertanian sudah oke semua sudah oke, dan Menteri Keuangan tidak ada anggarannya. Bermasalah Pak, ini harus dikarantina dengan ketat Pak, kenapa? Ini beras makin rusak, makin rusak, tambah penyakit, lari ke Gudang yang satunya menulari. Dan ini akan menular ke semua termasuk ancamanya menulari di persoalan lingkungan. Ini Bulog juga yang jadi masalah nanti. Nah ini kita yang sedang mengejar terus Pak. Saya bersurat, bersurat, dan bersurat terus. Bahkan menghadap sendiri. Tapi memang aturannya begitu Pak. Jadi yang sampai hari ini yang 20 ribu ton yang sudah mau dibikin etanol itu tidak jalan-jalan Pak, karena memang itu fakta kenyataannya.

Jadi mengenai hulu dan hilir ini penting, Bapak Ibu sekalian. Kami memang ingin mendukung, kami tidak juga kami harus memaksa kami harus jadi Badan Pangan itu, tidak juga. Tapi mungkin kalau kami tidak di bawah 5 Kementerian yang berbeda akhirnya kami bingung sendiri, mana yang harus kita ikuti begitu kan? Bulog ini bingung sendiri, sudah putusan A, tapi ada B,C,D, nah yang mana ini? Jadi begitu kan. Nah jadi seperti pada saat kita tugasnya hanya stabilisasi, ketersediaan stok. Begitu sudah dinyatakan "ya pelaksanaannya enggak. Nah ini jadi problema juga Pak.

Namun demikian sebenarnya Pak kalau kami ditanya soal bagaimana pengembangan Bulog untuk komersial? Wah kita sudah bekerja di semua Pak. Bahkan saya sudah bekerja dengan retail tadi. Retail-retail itu sudah kami bekerja sama. Bahkan operasi pasar yang selama ini kami sulit Pak

mendistribusikan, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena jejaring itu tidak dikuasai oleh Bulog. Jejaring itu tugasnya yang tadi beli kartel. Saya sudah tahu kartel juga, cuman kan enggak punya kewenangan apa-apa. Akhirnya saya hanya bisa melakukan dengan bagaimana saya melakukan terobosan sehingga mereka juga jadi kesulitan. Nah ini salah satunya Pak. Kami ke kartel bahkan ke kios, *grab* kios. Kami juga membuat sistem Pak, jualan *online* atau makanan.com itu dengan sistem Pak yang kami buat. Dan ini sudah kami tawarkan kepada Menteri Sosial. Besok Pak supaya menghilangkan kartel-kartel di lapangan, mafia-mafia yang memanfaatkan kegiatan BPNT itu mencari keuntungan bisa hilang dengan sistem ini Pak. Karena kami akan menyalurkan itu yang nanti berubah menjadi kartu sembako itu *door to door* Pak. Jadi kami cukup dikasih datanya, pasti sampai ke masyarakat penerima BPNT, jaminan Pak. Karena sudah saya coba sistem ini untuk DKI, berhasil Pak, bisa. Sehingga saya bilang kalau saya diberi kesempatan, tapi niatnya untuk niat kebaikan artinya tidak bicara untuk kepentingan bisnis keuntungan.

Kami bisa sampaikan Pak dengan sistem teknologi yang sekarang. Kami bahkan sudah akan bekerja sama dengan RT/RW Pak sebagai agen-agen untuk menyampaikan data yang benar kepada Bulog untuk kita tindaklanjuti dengan kita mendiskusikan. Kami sudah kerja sama dengan tadi yang disampaikan. Apakah dengan Shopee, apa, sudah. Semua sudah kita terobos. Bahkan sekarang dapat kemudahan. Kita sudah coba Pak, di BRI, BNI sekarang mengambil beras dari Bulog dan pasti sampai di rumahnya, alamat, kecuali alamat palsu. Dan sudah Pak, semuanya sudah Bapak Ibu sekalian, sampai. Dan inilah yang saya yakinkan manakala nanti ada program kartu sembako yang katanya Pak Presiden akan berubah dari BPNT menjadi kartu sembako. Iya, kami sudah membuat 12 produk untuk sembako pilihan dengan harga yang sama. Jadi masyarakat petani, kalau mendapatkan BPNT atau sembako, dia tidak mungkin perlu beras karena dia sudah pasti punya beras. Dia bisa pilih yang lainnya. Maka paket itu yang sudah kami siapkan, tinggal dia memilih. Mau paket yang mana yang dia pilih. Itu sudah ada kemudahan-kemudahan yang kami pikirkan. Bagaimana ke depan tidak lagi masyarakat kita dirugikan dengan sekarang mafia-mafia yang bekerja itu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan.

Maka dari evaluasi kami Pak, Ibu sekalian yang kita temukan di lapangan bahwa yang BPNT yang nilainya 110 ribu sekarang, itu rata-rata hanya maksimal 80 ribu sampai di masyarakat penerima BPNT. Yang lainnya itu memang hilang Pak, hilang. Karena apa Pak? Dari mulai tadi Pak, produknya yang diatasnamakan Bulog tidak berkualitas. Padahal bukan dari Beras Bulog. Sudah kami cek Pak dan dari Satgas Pangan sudah membuktikan bahwa itu bukan berasnya Bulog karena kita sudah melalui cek laboratorium sebelum kita menyalurkan beras itu. Dan kami sudah mau membuat Pak, mesin di seluruh gudang kami adalah melalui proses *rice to rice*. Jadi tidak ada lagi Pak untuk beras itu tidak baik. Ada kutunya, ada telurnya. Bahkan produk kami nanti semua di vakum. Begitu di vakum itu bertahan 1,5 tahun Pak. Jadi jaminan tidak akan ada kutu dan tidak akan ada telur lagi.

Di sisi lain, kami juga membuat beras fortifikasi. Karena program Pak Presiden kan SDM unggul, unggul itu harus dari pangannya. Salah satunya beras. Kami sudah Pak, beras bervitamin. Kita buat Pak, kita mendahului Pak.

Karena apa? Ya ini memang penting Pak untuk juga maka tadi Pak, Bu, program *stunting* tadi. Sudah kalau ini ada Pak, Bu. Saya yakin untuk masalah kasus *stunting* bisa hilang karena pokok utama pangannya adalah beras. Kami sudah, sekarang kami membuktikan lagi ternyata di Indonesia ini kaya dengan produk-produk beras-beras premium yang beras-beras khusus. Sekarang sudah kami produksi. Jadi kami memproduksi 50 produk beras komersial baru premium dan medium yang ini asli dari Indonesia yang hampir hilang bahkan. Karena ini variasi ini sudah mulai hilang karena kalah dengan yang sekarang, sudah. Dan ini beras khusus, di Padang banyak, ada anak daro. Kita memproduksi anak daro.

Umpamanya nanti di daerah Jawa Tengah dekat Ibu daerah Pati kan ada Rojo Lele. Kita betul-betul Rojo Lele dari kampung saya juga Bu, Pati. Jadi kita betul-betul membuat produk dari Sabang sampai Merauke. Sama dengan kopi itu Bu, Bapak Ibu sekalian. Ada kopi dari *sono* Sabang sampai Merauke. Jadi ini sebenarnya kita membuktikan Pak bahwa Indonesia ini kaya akan jenis pangan. Baru bicara beras saja sudah banyak. Dan kita sudah kemas ini dengan jaminan higienis dan aman dari penyakit karena ini melalui proses dan vakum semua. Ini sudah kita lakukan Pak, bahkan nanti *insyallah* tanggal 26 kita *lauching* Pak secara keseluruhannya di Jakarta di Kelapa Gading.

Ini hanya contoh saja Bapak Ibu sekalian yang *next* akan kita kembangkan untuk seluruh Indonesia, tadi yang menjawab. Jadi kita ke retail sudah, di seluruh Indonesia. Terus melalui kios, *grab* kios yang ada di seluruh Indonesia kita sudah mulai. RPK juga kita sudah seluruhnya. Nah kami sendiri ada program untuk belanja *online*. Ini mudah sekali dan begitu dia pesan hanya kurun waktu paling lambat 1 hari sampai di rumah, paling lambat. Dan ini karena kita kerja sama, biaya semua murah sama sekali. Nah ini nanti yang kita ini yang untuk menjawab bahwa sebenarnya permasalahan pangan itu mudah karena kita memang punya komitmen untuk kepentingan masyarakat kita dan saya juga sudah membuktikan bahwa produk dalam negeri khususnya beras ini bagus. Malah kami ada produksi beras hitam, beras merah, beras ketan, dan yang lain-lainnya kami ini juga tidak ada yang impor, tidak ada yang impor. Bahkan kalau kami ini menjual yang impor enggak laku, karena tadi, *taste* nya berbeda.

Ini hanya membuktikan, kami ingin mengembangkan diri kami Bulog untuk ke depan bahwa kami imbang antara penugasan dan komersial supaya kami tidak terbelit dengan beban biaya hutang tadi. Namun demikian karena besarnya beban untuk penugasan tadi, CBP yang tidak dianggarkan oleh APBN maka hutang kami yang besar ini. Jadi bekerja komersial kaya apa pun Bulog, tetap akan rugi. Karena untuk menutupi ini tidak tersampai. Nah ini.

Bapak Ibu sekalian,

Kami berharap juga ada penyaluran dari TNI, Polri, ASN. Kami sudah berkoordinasi dengan Panglima TNI, Kapolri. Beliau-beliau sangat setuju dan merespons baik karena melihat kualitas kita, jaminannya. Persoalannya satu Pak, di sub gaji nya TNI Polri, ASN itu anggaran untuk beli beras itu Rp 7.000. Padahal mereka membeli di luar itu Rp 12-13 ribu tapi tidak terasa karena tidak tahu. Tapi di kala kita akan memasukkan beras kita ke TNI Polri ASN maka kita akan dibayar dengan 7 ribu. Nah kan tidak mungkin, jadi tambah

rugi juga Pak. Ini persoalan juga, kami sudah sampaikan bahkan ini kita sampaikan kepada Pak Wapres pada saat itu “Pak, mohon izin nanti kalau ada peningkatan dari gajinya TNI Polri, tolong diutamakan adalah untuk pembelian beras yang dinaikkan sehingga mereka bisa mengambil beras dari Bulog”

Sebenarnya kalau TNI ASN ini bisa menggunakan beras Bulog, kami sudah tertolong. Apalagi kalau nanti seluruh seperti BUMN, Kementerian ya termasuk anggota DPR menggunakan beras Bulog maka saya yakin kita tidak ada permasalahan apa pun walaupun kita masih uang pinjam. Nah persoalannya sekarang kan kita tidak bisa apa-apa, uang pinjamannya bunganya jalan terus, kualitasnya turun terus. Ini memang minta ampun begitu kan.

Bapak Ibu sekalian,

Untuk permasalahan kami berubah menjadi Badan Pangan, kami serahkan pada negara, kami serahkan. Pada prinsipnya kami mau dijadikan apa saja sebenarnya siap. Karena mohon izin, kalau Badan itu kan di bawah Presiden. Kadang kala kesulitan kami ini begitu Presiden mengatakan A, kami tidak bisa melaksanakan A karena ada kebijakan-kebijakan dari beberapa Menteri yang tidak mengatakan A. Iya ini yang menjadi persoalan di Bulog sehingga kami tidak bisa apa-apa, begitu. Nah ini memang perlu nanti perubahan regulasi tentunya. Kepastian untuk Bulog mau jadi apa, kewenangannya apa. Karena ini hanya upaya, terobosan banyak Pak, Bapak Ibu sekalian.

Tadi kalau Ibu tanya bagaimana untuk pembuatan tadi, modernisasi. Kita punya dana PMN nilainya 2 triliun. Nah ini sedang kami manfaatkan untuk sarana prasarana pendukung Bulog. Yang lalu sebetulnya sudah, sudah hampir jadi. Tapi begitu kami jadi Dirut, kami evaluasi, kami batalkan semua rencana yang lalu karena tidak sesuai dengan peruntukannya menurut kami. Karena ini akan mangkrak. Sehingga kita evaluasi kembali, kita rubah. Maka itu mundur penggunaannya, lalu *insyallah* mulai Januari sudah *running* semuanya. Ini termasuk tadi pembelian *rice to rice* segala macam. Dan kami ingin banyak Bapak Ibu sekalian berbuat untuk petani. Malah kerja sama kami dengan kelompok-kelompok tani juga intens begitu. Kami membantu Menteri Pertanian.

Memang banyak kesulitan Pak di petani. Kami paham betul. Termasuk pemberian KUR, iya kan? Itu dan macam-macam. Dia lebih berpihak pada ya tadi, tengkulak-tengkulak tadi yang sebenarnya sudah terkunci dengan tengkulak. Nah ini kami berupaya mendobrak ini supaya bagaimana mereka hilang. Dan sekarang, saya jujur saja memang sebenarnya saya sudah tahu kartelnya. Begitu saya mau kuasai, mereka gelisah. Tapi kalau ini nanti jalan tiga-tiganya saya yakin negara yang menguasai pangsa ini, khususnya masalah beras.

Bapak Ibu sekalian.

Jadi sekali lagi yang 20 triliun tadi itu adalah pengajuan keinginan saya untuk menjamin artinya CBP ini Bu, ini adalah dibiayai oleh negara 20 triliun. Jadi kalau ada operasi pasar perintah negara, beras kita beli 10 ribu umpama.

Pemerintah mengatakan lepas di lapangan 5 ribu ya kami lepas 5 ribu. Kan bukan duit kami, tidak ada bunganya, iya kan? Kan perintah negara dan itu sebagian dari subsidi negara kepada masyarakat. Selesai saya persoalkan, kalau sekarang kami kerjakan lepas 6 ribu, terus yang nanggung utangnya siapa? Seperti itu. Belum lagi kami bertempur di lapangan ini dengan mekanisme dan kartel-kartel ini. Nah sekarang dengan sistem yang kami bangun, kami punya keyakinan bahwa dengan hasilnya jejaring kartel ini akan runtuh, karena Pak dengan kemudahan-kemudahan dan harga yang murah. Nanti di ritel-ritel Bapak Ibu sekalian, itu beras medium itu mudah di dapat yang sekarang ini kan kebanyakan beras premium. Nah kami sudah kerja sama dengan retail seluruh Indonesia itu nanti ada beras Bulog yang harganya murah dan medium. Medium komersial dan medium untuk OP. Artinya masyarakat bisa beli beras dengan murah.

Memang kami menyangkan satu hal untuk mengatasi hal ini dalam rangka menjaga supaya Bulog tidak rugi dengan beras yang turun Pak. Maka kami ingin ada satu keputusan nanti melalui Rakortas bahwa ada OPsus, di mana penerima BPNT itu dia bisa membeli beras murah yang harganya sekilo Rp 2.000. Akhirnya kami sudah mengajukan, bersurat juga. Karena ini tahun 2015 pernah dilakukan untuk Saudara-saudara kita yang kurang mampu. Nah ini memang nanti keputusannya kembali lagi kepada Menteri Keuangan.

Bapak Ibu sekalian,

Sebenarnya banyak hal yang harus kami sampaikan. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian nanti akan ditambah penjelasannya dari para Direksi saya. Jadi sekali lagi kami ingin banyak berbuat. Khususnya kami juga ingin mempertahankan dan membuktikan bahwa produksi beras dalam negeri itu mumpuni. Karena waktu itu Pak, hari ini pun masih ada yang meminta kepada kami sebulan itu 50 ribu ton kita bisa menjual. Sampai hari ini, ini juga masih, masih orangnya mau. Hanya harganya yang enggak bisa. Nah ini yang memang ada kekhususan kami. Padahal permintaan itu banyak Pak. Seharusnya kita bisa subsidi entah bagaimana kita ini supaya petani ini supaya petani ini ada jaminan beras kita ini memang bisa keluar lebih dan yang penting lagi, kebanggaan buat negara kita Pak, bahwa kita ini betul-betul bisa ekspor begitu. Ya memang sebenarnya bisa. Hanya persoalannya harganya, kalau harga ini karena *cost* nya tinggi Pak. Karena kita masih konvensional menanamnya, cara menanamnya, dengan biaya tinggi. Sehingga harganya jatuhnya tinggi.

Tapi kalau kita sudah modernisasi, semua disubsidi tadi seperti beliau sampaikan, kita Pemerintah mau menyubsidi petani, saya yakin beras kita akan murah dan bisa kita ekspor. Sementara ini Pak yang, Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada tambahan daripada Direksi.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Teman-teman apakah penjelasan Pak Dirut Perum Bulog sudah cukup? Kalau sudah cukup saya rasa tidak perlu dilanjutkan oleh Direksi yang lain. Cukup? Cukup ya Pak Dirut ya. Terima kasih kepada,

F-NASDEM (Hj. SRI WULAN, S.E.):

Pimpinan boleh Pimpinan? Wulan, Wulan sebelah sini kanan. Terima kasih.

Luar biasa Pak Dirut, jadi kita dengar bahwa posisi Bapak sebenarnya hanya sebagai pemanis begitu. Jadi kita sedih sebenarnya. Jadi Bapak sebenarnya bisa melakukan yang lebih untuk bangsa ini tetapi terganjal dengan aturan-aturan yang nanti di bawah Kementerian-kementerian begitu loh. Jadi kita juga bingung. Ini hal baru buat saya dan saya dengar bahwa yang selama ini disampaikan masyarakat semuanya tergantung dengan Bulog, ternyata Bulog enggak bisa apa-apa begitu.

Jadi saya berdiskusi juga dengan teman-teman juga tadi di sini sambil mendengarkan dari pemaparan Bapak, kok kasihan banget begitu loh. Jadi yang harusnya Bapak bisa mempunyai terobosan dan berbuat lebih ternyata terganjal. Jadi untuk itu saya masih mendukung sekali Pak. Jadi mendukung perubahan, terobosan yang mungkin bisa Bapak laksanakan ke depan. Jadi kita tunggu aksi Bapak di lapangan. Terima kasih.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Pak Ketua, dari saya satu lagi.

Bapak Dirut untuk kaitan tadi BPNT, adakah pedoman umum yang mengatur sampai *detail*? Kalau renstra itu kan, Rastra ya? Ada pedoman umumnya yang mengatur seperti apa dan bagaimana. Jangan sampai terjadi tumpang tindih sehingga tadi, Pak Dirut sendiri tidak bisa, harus mampu mengendalikan itu semua. Mohon penjelasannya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Mbak Nuraeni, BPNT itu bukannya di Bulog, itu Juklak-Juknisnya di Kemensos. Maka di sini nanti juga agar *e-warung* yang menyalurkan BPNT kita atur waktu rapat gabungan antara Bulog dengan Kemensos.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Setuju Pak Ketua, betul. Itu yang saya maksudkan.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Menambah yang disampaikan Pak Ketua. Yang pertama setuju, yang kedua tampaknya dari tadi justru persoalannya Bulog juga butuh dukungan dari anggaran negara. Jadi bukan hanya Kemensos mungkin Pak Ketua, karena ini untuk menjamin pangan masyarakat, ini Kemenkeu.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Saya paham Ibu, nanti Ibu lihat di kesimpulan rapat.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Oke siap Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Jadi kalau istilahnya, Pak Buwas ini dikasih uang 100 ribu, Bapak berangkat ke Papua. Mau naik apa? Silakan mau naik apa dengan 100 ribu, kan begitu Pak Dirut ya?

Bapak Ibu yang kami hormati,

Dari dialog, saran, dan masukan anggota Komisi IV. Sebelum acara ini kita akhiri, kami akan bacakan kesimpulan RDP pada hari ini. Iya kesimpulan rapat, *gede in* sedikit.

Satu, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendorong Pemerintah untuk melakukan penguatan dalam sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perum Bulog.

Iya, pakai *mic* supaya direkam.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Oh iya terima kasih.

Untuk yang poin satu itu apakah ini pertanyaan saya, Pemerintah ini perlu dipertegas siapa nya, c.q. nya. Terima kasih. Misalnya Kemensos, Kementerian Keuangan, kemudian pihak-pihak yang dimaksud dengan terkait dengan Bulog ini mana saja kan begitu. Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Mbak Luluk. Yang dimaksud Pemerintah itu Presiden berserta Menteri-Menterinya. Jadi enggak perlu dijelaskan secara *detail* karena itu bukan domain kita juga, setuju? Pak Dirut setuju?

(setuju)

DIRUT PERUM BULOG (Komjen. Pol. (Purn.) Drs. BUDI WASESO):

Untuk sirkulasi regulasi Pak, mohon izin Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Sinkronisasi, regulasi. "Dan" nya dihapus lagi dong itu, masa "dan" nya 2 kali. Itu penempatan "dan" nya enggak salah ya? Kayaknya redaksinya ada yang salah deh. Sinkronisasi koma, harmonisasi koma, "serta" nya harusnya dihilangkan, diganti dengan "dan".

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Pak Dirut Pak, ini kan yang dimaksud dengan dari apa yang disampaikan oleh Pak Dirut itu. Yang disinkronkan itu adalah regulasinya.

Yang diharmonisasikan itu regulasinya. Jadi kalau mau pakai yang sinkronisasi koma, harusnya sinkronisasi regulasi, harmonisasi regulasi. Kan di situ yang dimaksud oleh Pak Dirut tadi itu.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Enggak perlu regulasinya sampai berkali-kali bos. Cukup satu saja.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Makanya yang kalimat yang barusan di Bapak itu benar itu yang sinkronisasi dan harmonisasi regulasi. Atau ditambah lagi baik regulasi maupun kebijakan. Pas juga enggak apa-apa. Nah kalimat yang tadi sebelum diubah.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Ya kalau yang tadi enggak usah diomongin lah.
Pak Dirut setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Dua, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendorong Pemerintah untuk memberikan penugasan kepada Perum Bulog dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi pangan pokok melalui pengelolaan cadangan pangan Pemerintah khusus untuk *community* beras, jagung, kedelai, gula, dan daging, dengan memberikan modal kerja pada Perum Bulog sesuai dengan tata atau pemanfaatan yang disepakati antara Pemerintah dan Perum Bulog.

Jadi kami tidak punya hak menentukan nilai besarnya. Kalau kami tadi ada yang mengusulkan harus 20 triliun, nanti Pemerintah sama Pemerintah. Bukan Pemerintah dengan DPR.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Ketua, telur tidak masuk. Telur dan tepung terigu, saya juga ini. Telur komoditas yang paling tinggi juga.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Perpresnya cuman hanya ini saja.

Itu nanti Bu Luluk kalau sudah jadi Pangan Nasional. Kenapa enggak? Karena di Pangan Nasional itu ada tanda kutip orang yang merasa tidak nyaman kalau Badan Pangan Nasional jadi terbentuk. Istilahnya bilang ya begitu lah. Pak Dirut setuju?

(RAPAT: SETUJU)

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Izin menambahkan sedikit Pak.

Ini katanya dengan pangsa Bulog. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk memberikan penugasan kepada Perum Bulog dalam menjaga keterjangkauan, ketersediaan pasokan, dan stabilisasi harga pangan pokok melalui, iya, tambahannya satu saja.

Iya keterjangkauan Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Saya agak bingung juga teman-teman anggota. Apa yang dimaksud dengan keterjangkauan? Kalau masalah harga kan sudah ada standarnya. Coba.

DIRUT PERUM BULOG (Komjen. Pol. (Purn.) Drs. BUDI WASESO):

Mohon izin kalau keterjangkauan itu berarti di seluruh wilayah ada Pak, sudah di dapat Pak. sudah di seluruh wilayah karena kita kan punya gudang dimana-mana Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Oh yang dimaksudkan keterjangkauan diakses? Anggota bagaimana?

DIRUT PERUM BULOG (Komjen. Pol. (Purn.) Drs. BUDI WASESO):

Setuju Pak, harus Pak. Sesuai dengan fungsinya Bulog itu. Kan sudah jelas.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Nah itu yang, ini kalau di pemikiran saya tadi, keterjangkauan itu harga bukannya keterjangkauan *delivery*, pengiriman begitu.

Ini redaksinya masih agak, benar kata Pak Surnarna, tadi agak bias. Apa pengertian keterjangkauan itu?

PERUM BULOG:

Izin. Jadi sesuai dengan Perpres nomor 48 maupun PP nomor 13 tahun 2016. Jadi sebenarnya fungsi Bulog itu ada 3 Bapak. Yang pertama yaitu menjaga keterjangkauan. Yang kedua adalah ketersediaan. Yang ketiga adalah stabilisasi. Nah perbedaan keterjangkauan dengan ketersediaan itu memang beda. Keterjangkauan itu maksudnya Bulog,

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Sampai di tempat tujuan? Ada di tempat tujuan?

PERUM BULOG:

Sampai ke titik-titik di ujung Pak. Contoh misalkan di daerah Papua. Kita bisa tembus sampai ke Wamena, terus ke puncak Jaya dan sebagainya. Itu memang kita ada divre dan sub divre yang menangani Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Kalau kira-kira keterjangkauan pengiriman, saya rasa itu lebih baik Pak. Jadi tepat bukan masalah keterjangkauan harga,

PERUM BULOG:

Bukan. Kalau keterjangkauan harga kaitannya dengan masalah bagaimana menjaga stabilisasi.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Jadi kita masukkan keterjangkauan pengiriman,

PERUM BULOG:

Siap. Distribusi juga bisa.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Atau distribusi? Keterjangkauan distribusi?

PERUM BULOG:

Lebih tepat sasaran.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Sudah setuju tadi ya?

Sekarang ketiga. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung Perum Bulog mengusulkan kepada Menko Perekonomian untuk mengeluarkan keputusan persetujuan pengeluaran 150 ribu ton Cadangan Beras Pemerintah setiap bulannya dengan mekanisme secara langsung kepada 15,5 juta KPM melalui titik distribusi tertentu yang tersebar di Indonesia.

Anggota?

ANGGOTA KOMISI IV:

Sebentar Pimpinan. Distribusi tertentu itu maksudnya apa?

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Keluarga Penerima Manfaat tadi yang BPNT tadi loh, yang menerima BPNT tadi.

PERUM BULOG:

Izin Pak, izin Pimpinan.

Untuk yang poin tiga saya kira ini yang dimaksud adalah KPSH *targeted* Pak, yang tadi disampaikan Pak Dirut. Nah ada 15,6 juta KPM. Jadi saran kami di poin 3 mekanisme, harus jelas mekanismenya apa. Jadi mekanisme KPSH *targeted*. KPSH itu Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga. Tapi yang target 15,6.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Karena kalau enggak dipaksakan keluar ini enggak keluar-keluar Cadangan Beras Pemerintah ini. Tinggal menunggu hancurnya saja.

PERUM BULOG:

Target, target. 15,6 ya? 15,6 juta bukan 15,5.

Cuman biasanya Pak ini yang kita harapkan menjelang panen Pak. jadi sebelum panen. Jadi bulan Desember.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Direktur, ini catatan yang dari Bulog 15,5 loh, bukan 15,6. Ini bahan yang kami terima dari Bulog.

PERUM BULOG:

Salah ketik Pak. yang benar 15,6 data dari Kemensos. Mohon maaf.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Ya harusnya besok-besok di ralat lah.

PERUM BULOG:

Siap.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Anggota tolong dibaca dulu jelas. Kalau sudah setuju. Dibaca dulu, baru saya bacakan ulang.

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung Perum Bulog mengusulkan, kita hanya mendukung. Mengusulkan kepada Menko Perekonomian untuk mengeluarkan keputusan persetujuan pengeluaran 150 ribu ton Cadangan Beras Pemerintah setiap bulannya

dengan mekanisme ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga *targeted* secara langsung kepada 15,6 juta.

Harusnya keluarga atau kepala keluarga? Keluarga? Penerima Manfaat atau KPM melalui titik distribusi tertentu yang tersebar di Indonesia.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Iya ketua ya.

Mendukung, sudah setuju. Tetapi apakah ada langkah lain yang dapat dilakukan Komisi IV dalam fungsi mendukung itu? Misalnya, Komisi IV sudah akan menyurati atau apa begitu, membicarakan dengan Pimpinan DPR dalam kaitan dengan fungsi mendukung ini. Jadi biar kuat begitu. Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Bu Luluk, ini mendukung nanti kan nanti Beliau-beliau ini ada Rakortas. Jadi kita kalau bikin surat juga tidak boleh sembarangan mengeluarkan surat. Surat pun biasanya harus minta persetujuan Ketua yang membawahi, Komisi IV.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Pak Ketua, saya kira angka-angka ini juga sesuaikan dengan validasi juga, data-data kesesuaian terhadap nilai-nilai ini nantinya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Ini sudah dari Bulog ini tadi. Nanti bahannya dibaca dulu. Jadi, Sekretariat berapa hari lalu bahannya Bulog terima? Ah bahannya 2 hari lalu tapi mungkin baru diterimanya pagi ini oleh anggota. Saran saya, Pak Dirut kalau bias,

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Izin Ketua.

Itu "mendukung" saya pikir lebih mantap lagi kalau ditambahi "dan mendesak".

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Tidak boleh mendesak.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Tidak boleh Pak?

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Kita tidak boleh mendesak. Karena kita sama Pemerintah itu *partner*. Kecuali Pemerintah anak buah kita, beda lagi. Kalau Gubernur mendesak Bupati boleh.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Izin Ketua.

Ini apa namanya, mencontoh saja sih dari apa yang dilakukan oleh teman lain Komisi lain yang terkait dengan kesulitan secara kelembagaan yang mirip seperti ini. Kemudian yang bisa dilakukan adalah selain mendukung adalah dengan turut menyampaikan kepada Pimpinan DPR RI dukungan kita ini, begitu. Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Mbak Luluk, nanti kesimpulan, setiap kesimpulan kan kami laporkan ke Korinbang, ke Ketua DPR, termasuk juga ke Fraksi kami. Jadi setiap habis rapat, saya selaku Ketua Komisi melaporkan langsung kepada Fraksi kami Mbak. Karena sebelum ditagih, kami langsung melaporkan bahkan sehabis rapat dengan Menteri LHK, saya ditertawakan “baru selesai bos?”. Iya, saya bilang.

Pak Dirut setuju? Nomor 3 setuju ya?

DIRUT PERUM BULOG (Komjen. Pol. (Purn.) Drs. BUDI WASESO):

Setuju Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

(RAPAT: SETUJU)

Keempat, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan agar Pemerintah segera menyusun kebijakan Cadangan Beras Pemerintah yang penyalurannya dalam bentuk Bantuan Pangan Non Tunai atau kartu sembako dengan harga yang tepat dan kualitas yang baik kepada Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri, BUMN, serta masyarakat berpendapatan rendah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Jadi dalam hal ini, jangan sampai ada pertanyaan. Kita hanya boleh mengusulkan. Jangan nanti saya dipaksa memaksakan. Silakan anggota? Pak Dirut?

DIRUT PERUM BULOG (Komjen. Pol. (Purn.) Drs. BUDI WASESO):

Yang poin empat Pak, izin menambahkan kata-katanya supaya lebih enak.

Komisi IV DPR RI mengusulkan agar Pemerintah segera menyusun kebijakan Cadangan Beras Pemerintah yang penyalurannya dalam bentuk Bantuan Pangan Non Tunai atau kartu sembako dengan harga yang tepat

dan kualitas yang baik dan juga kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, BUMN, serta masyarakat berpendapatan rendah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Tadi kan sudah ada “kepada” Pak, kalau pakai “dan juga” malah ini. Yang baik “kepada”.

PERUM BULOG:

Soalnya ini beda Pak konseptualnya Pak. Kalau ASN itu kan berbentuk natura, kalau masyarakat itu beda. Beda.

Izin Pak.

Ini maksudnya kalau untuk masyarakat itu memang bentuknya itu Bantuan Pangan Non Tunai dan kartu sembako. Tapi untuk Aparatur Sipil itu bentuknya kan natura Pak. Jadi berbeda Pak. Bukan BPNT Pak. Karena kalau ASN, TNI, Polri itu sebenarnya dia sudah punya anggaran namanya natura itu jumlah 7 ribu. Cuma ditingkatkan tunjangannya menjadi 11 ribu supaya bisa dilayani oleh Perum Bulog.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Kalau begitu di tukar saja. Masyarakatnya didahulukan. Kepada masyarakat berpendapatan rendah dan juga Aparatur Sipil Negara (ASN). Anggota di baca dulu.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Mestinya Pak Ketua jangan pakai “juga” Pak Ketua, “dan”.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Dibaca dulu pelan-pelan. Saya paham Bu, Ibu Endang sudah jam nya makan siang Bu. Jadi matanya agak kunang-kunang sedikit.

Sudah di baca? Saya bacakan dulu ini ya.

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan kepada Pemerintah segera menyusun kebijakan Cadangan Beras Pemerintah yang penyalurannya dalam bentuk,

Tolong kalau lagi dibaca jangan di itu kan lagi dong. Saya ulang.

Nomor empat, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan agar Pemerintah segera menyusun kebijakan Cadangan Beras Pemerintah yang penyalurannya dalam bentuk Bantuan Pangan Non Tunai atau kartu sembako dengan harga yang tepat dan kualitas yang baik kepada masyarakat berpendapatan rendah.

Loh kan sudah ada “serta” nya, jadi enggak perlu titik. Begini loh, enggak bisa. Karena ini kan satu kesatuan ya. Berpendapatan rendah kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Karena mereka tadi yang dikatakan oleh Pak Direktur mendapatkan natura senilai 7 ribu. Akan peraturan dan perundang-undangan.

Pak Dirut setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Kelima, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung upaya Perum Bulog untuk menyediakan beras dan pangan berfortifikasi sebagai bagian upaya meningkatkan gizi masyarakat maupun percepatan pencegahan dan penanganan *stunting*.

Anggota? Dirut?

F-NASDEM (Hj. SRI WULAN, S.E.):

“dan” nya kurang kayaknya Pak Ketua. Tadi Pak Ketua baca ada “dan” nya. Itu di tertulis tidak ada “dan” nya. Yang bawah, yang bawah. Yang 5 bawah “maupun percepatan pencegahan dan,” tadi Pak Ketua bilang kaya begitu.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Penanganan *stunting*.

F-NASDEM (Hj. SRI WULAN, S.E.):

Jadi pakai “dan” atau enggak?

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Enggak dong.

F-NASDEM (Hj. SRI WULAN, S.E.):

Oh tadi Pak Ketua ada “dan” nya yang disampaikan. Jadi saya mencermati ini Pak Ketua oke, oke.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Memang kalau makan beras saja enggak bisa, *stuntingnya* bisa hilang? Kan enggak.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Oh bukan. Ini kan konteksnya pencegahan itu berarti sebelum lahir.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pemerintah?

(RAPAT: SETUJU)

Keenam,

F-PD (HJ. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Sebentar Pak. Pak Ketua. Untuk poin tadi, berfortifikasi itu bisa dijelaskan enggak, supaya lebih rinci. Enggak maknanya apa?

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Bergizi dan bervitamin.

PERUM BULOG:

Mungkin lebih (suara tidak jelas) ya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Nanti sampai di luar kalau di sini WIFI nya jelek, buka Google apa artinya ya.

Keenam, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Pemerintah untuk segera menyusun kebijakan yang bersifat *mandatory* agar seluruh beras dan pangan yang dikelola Perum Bulog disalurkan wajib berfortifikasi.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Pak Ketua, dikasih dalam kurung saja. Nanti ini kan dokumen bisa dibaca publik. Mereka bingung mau tanya ke siapa. Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Ini Bahasa Indonesia, jadi kalau di terjemahkan, Panjang banget. Dari awal. Pemerintah, Pemerintah bagaimana nomor 6?

DIRUT PERUM BULOG (Komjen. Pol. (Purn.) Drs. BUDI WASESO):

Yang poin 6 Pak. Itu disalurkan secara wajib itu mungkin “wajib” nya dihilangkan saja Pak. Karena kalau kita akan membuat semuanya pakai berfortifikasi. Ini kita memang butuh waktu Pak karena mesinnya ini kan ada biaya juga Pak, mahal jatuhnya Pak. Mungkin,

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Jadi tadi dari Pak Dirut mengatakan bervitamin, bergizi, dan lain-lain. Sekarang kalau kami hanya menulis “wajib” terus dihilangkan, berarti kapan dimulainya?

DIRUT PERUM BULOG (Komjen. Pol. (Purn.) Drs. BUDI WASESO):

Di poin 5 Pak. Di poin 5 nya sebenarnya sudah ada Pak.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Pak Ketua, saya kira yang poin 6 ini menyusul kebijakannya Pak. Belum dalam bentuk implementasinya. Jadi menyusun kebijakan yang bersifat mandatory. Jadi wajib Pak, wajib. Sekiranya begitu Pak Ketua?

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Jadi Pak Suhardi, tadi Pak Dirut yang mengatakan demikian. Kami hanya menulis membuat kesimpulan. Jadi, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Yang ketujuh. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Pemerintah untuk segera membentuk Badan Pangan Nasional sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan menunjuk Perum Bulog sebagai Lembaga Pemerintah yang melaksanakan penugasan di Bidang Pangan.

ANGGOTA KOMISI IV:

Ketua, saya ingin sedikit bertanya antara segera. Segera ini dalam artinya besok lusa atau 3 bulan? Karena kemarin keputusan kita itu waktu tiga bulan Pak. Nah ini demikian kata segera ini jangan sampai bertentangan dengan kesimpulan kita kemarin pada saat dengan Kementerian Pertanian. Kalau lebih aman, hilang "segera" nya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Jadi begini, Bulog ini tidak ikut dalam Rapat Badan Ketahanan Pangan loh. Itu domainnya Pertanian. Jadi Pertanian itu sudah dicantumkan. Saya rasa di sini tidak perlu dicantumkan karena kan yang intinya di sana, di Kementerian Pertanian. Pak Buwas senyum-senyum langsung mendapat penugasan.

ANGGOTA KOMISI IV:

Setuju Pak Ketua, setuju. Ketuk-ketuk-ketuk.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Dirut?

DIRUT PERUM BULOG (Komjen. Pol. (Purn.) Drs. BUDI WASESO):

Setuju Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

(RAPAT: SETUJU)

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Sebelum kami menutup RDP ini, kami persilakan Dirut Perum Bulog untuk menyampaikan kata penutup. Silakan.

DIRUT PERUM BULOG (Komjen. Pol. (Purn.) Drs. BUDI WASESO):

Yang kami hormati Ketua dan anggota Komisi IV DPR RI,

Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dari Bapak Ibu sekalian dengan harapan tentunya Bulog tetap bisa eksis untuk kepentingan bangsa dan negara. Sekali lagi kami terima kasih Pak atas dukungan dan masukannya. Dengan tujuan kami ke depan akan lebih baik. Terima kasih.

Wabillahitaufik wal hidayah, Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah Rapat Dengar Pendapat pada hari ini. Atas nama Pimpinan dan anggota Komisi IV mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini terdapat kekurangan atau kekhilafan. Dengan mengucapkan *alhamdulillah hirrabilalamin* RDP ini kami tutup.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP)

Jakarta, 21 November 2019

a.n. Ketua Rapat,
Sekretaris Rapat

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
NIP. 196301221991031001